KEPEMIMPINAN WALI NAGARI PADA MASYARAKAT MULTIKULTURAL DALAM PERPEKTIF FIQH SIYASAH DI NAGARI TANJUNG BETUNG TIMUR

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH) Pada Program Studi Hukum Tatanegara (Siyasah)

Oleh:

MIFTAHUL FATHON

NIM :1318.009

PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIA'AH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI
TP: 2024 M/ 1445 H

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul "Kepemimpinan Wali Nagari Pada Masyarakat Multikultural Dalam Perspektif Fiqh Siyasah di Nagari Tanjung Betung Timur Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman" yang disusun oleh Miftahul Fathon, NIM 1318.009 Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi telah dilakukan bimbingan secara maksimal dan untuk selanjutnya disetujui untuk diajukan ke sidang munaqasyah skripsi.

Bukittinggi, 30 Januari 2023

Dosen Pembimbing

Dr. Saiful Amin, M.ag
NIP. 196508101992031003

Mengetahui
Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek
Bukittinggi

Febriyeni, M.Ud
NIP. 199002242018012001

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi yang berjudul "Kepemimpinan Wali Nagari Pada Masyarakat Multikultural Dalam Perspektif Fiqh Siyasah di Nagari Tanjung Betung Timur Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman" yang disusun oleh Miftahul Fathon, NIM 1318.009, telah diuji dalam sidang munaqasah Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) pada hari …Tanggal … telah berhasil dipertahankan di hadapan Tim Penguji dan dapat diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk meperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Tata Negara Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

Bukittinggi, ……..

TIM PENGUJI

Ketua	Sekretaris
……..	……
NIP. ……..	NIP. ……

Anggota

Penguji Utama	Penguji Utama
……..	……..
NIP. ……..	NIP…….

Penguji Pendamping

……..
NIP. ……

Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

d

Dr. Nofiardi, M.Ag
NIP. 197606062005041004

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Miftahul Fathon

NIM : 1318.009

Tempat/ Tanggal Lahir : Rambahan 27 Desember 1999

Program Studi : Hukum Tatanegara (Siyasah)

Fakultas : Syariah

Judul Skripsi : Kepemimpinaan Wali Nagari pada Masyarakat Multikultural dalam Perspektif *Fiqh Siyasah* di Nagari Tanjung Betung Timur

Menyatakan dengan ini sesungguhnya bahwa karya ilmiah (skripsi) penulis dengan judul di atas adalah benar asli karya penulis. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan karya sendiri, maka penulis bersedia diproses sesuai hukum yang berlaku dan gelar kesarjanaan penulis dicopot hingga batas waktu yang tidak ditentukan. Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bukittinggi, ……. 2023

Yang menyatakan

Materai
10000

Miftahul Fathon

NIM. 1318009

ABSTRAK

Skripsi ini ditulis oleh **MIFTAHUL FATHON, NIM 1318009**, Program Studi Hukum Ketatanegaraan Islam, Fakaultas Syari‟ah Universitas Islam Negeri Sjech Djamil Djambek Bukittinggi Skripsi yang berjudul **"Kepemimpinan Wali Nagari pada Masyarakat Multikultural dalam Persfektif Fiqh Siyasah di Nagari Tanjung Betung Timur Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman."**

Wali nagari dalam menjalankan kepemimpinannya di dalam masyarakat yang multikultural harus mampu memposisikan dirinya sebagai orang yang mengayomi masyrakat sehingga pembangunan berjalan dengan adil dan merata di dalam masyarakat yang multikultural, namun pada kenyataanya wali nagari dalam kepemimpinannya menjalankan pembangunan dalam masyrakat kurang merata tetapi hanya menumpuk pada satu titik atau lokasi yang merupakan masyarakat atau golongannya saja serta belum sepenuhnya menjunjung tinggi prinsip keadilan dan keterbukaan sesuai dengan pandangan *fiqh siyasah.* Penulis merasa tertarik untuk meneliti hal tersebut yang bertujuan untuk mengetahui jawaban tentang bagaimana kepemimpinan Wali Nagari dalam pelaksanaan pembangunan di dalam masyarakat multikultural di Nagari Tanjung Betung Timur dan untuk mengetahui bagaimana pandangan *fiqh siyasah* terhadap kepemimpinan Wali Nagari dalam masyarakat multikultural di Nagari Tanjung Betung Timur.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif analisis yaitu penelitian yang menguraikan data yang bersumber dari data primer melalui wawancara, observasi maupun laporan-laporan dalam bentuk dokumen dan data sekunder dengan mengadakan studi pustaka (*library research*) yang berupa sumber-sumber hukum Islam dan peraturan perundang-undamgan, dokumen dan buku karya ilmiah lainnya, data-data yang dapat diambil sebagai rujukan untuk selanjutnya dianalisa secara sistematis untuk menunjang dalam pembahasan..

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Kepemimpinan Wali Nagari dalam Pelaksanaan Pembangunan di dalam Masyarakat Multikultural di Nagari Tanjung Betung Timur belum mampu menjalankan kepemimpinannya dalam menjalankan pembangunan di dalam masyarakat yang multikultutal, hal ini di tandai dengan pembangunan yang lebih baanyak dilakukan terhadap masyarakat Minang saja sedangkan masyarakat suku lainnya belum memperoleh apa yang mereka usulkan untuk dibangun di daerahnya. Pandangan *Fiqh siyasah* terhadap kepemimpinan Wali nagari pada masyarakat multikultural di Nagari Tanjung Betung Timur belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip yang terdapat dalam *fiqh siyasah* karena pengambilan keputusan yang dilakukan oleh wali nagari masih kurang menerapkan prinsip musyawarah dan belum mengefektifkan prinsip transparansi seperti sosialisasi dana nagari melalui pemasangan baliho atau sarana lainnya sehingga berpengaruh pada tingkat parstisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pemberdayaan di dalam nagari.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah wasy syukru lillaah, segala puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT. Atas segala limpahan rahmat, karunia dan hidayah-Nya kepada penulis sehinga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Baginda Muhammad, Rasulullah Saw. Yang menjadi suri teladan terbaik bagi umat manusia dan pedoman berakhlakul karimah sepanjang masa.

Penulis tidak akan mampu menyelesaikan skripsi ini tanpa bantuan dari keluarga, dosen pembimbing dan bimbingan dari berbagai pihak yang selalu mendukung dan mendoakan penulis. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berusaha ikhlas membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, ucapan itu penulis sampaikan kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Ridha Ahida, M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Wakil Rektor I Bapak Dr. Asyari, S.Ag, M.Si. Wakil Rektor II Ibu Dr. Zulfani Sesmiami, M.Pd. Wakil Rektor III Bapak Dr. Arman Husni, Lc, MA.
2. Bapak Dr. Nofiardi, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah. Wakil Dekan I Bapak Dr. Dahyul Daipon, M.Ag. Wakil Dekan II Bapak Dr. Fauzan, M.Ag. Wakil Dekan III Bapak Dr. Beni Firdaus, SHi, MA.
3. Ibu Febriyeni, M.Ud selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara dan Bapak Hendri, SH, M.Si selaku Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara.
4. Penasehat Akademis penulis yang selalu memberikan saran-saran dan motivasi kepada penulis selama kuliah di UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi Bapak Adlan Sanur Tarihoran, M.ag
5. Bapak Dr. Saiful Amin M.ag sebagai pembimbing skripsi yang telah memberikan petunjuk, arahan dan bimbingan dalam menjawab persoalan yang penulis bahas untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak dan ibu dosen Fakultas Syari'ah khususnya dan seluruh civitas akademik UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi pada umumnya, yang

telah memberikan ilmu serta pengetahuan kepada penulis selama menimba ilmu di UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

7. Ibunda Elmi dan Ayahanda Nasrul, dan Adek Ulfa Nuraini serta seluruh keluarga besar yang dengan tulus memberikan cinta kasihnya,bantuan materil,moril maupun spritual kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan pendidikdan UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.
8. Untuk sahabat, teman-teman, adik-adik, abang dan kakak ispirator yang menjadi orang-orang spesial di hidup penulis dalam memberikan nasehat daaan tempat diskusi selama penulis menempuh pendidikan di UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi sehingga penulis mendapatkan motivasi untuk terus berkembang, yang namanya tidak dapat disebutkan satu-persatu, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya. Hanya Allah SWT yang bisa membalas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis.

Akhirnya kepada Allah SWT penulis berserah diri dan kepada manusia penulis mohon maaf dan semoga apa-apa yang kita kerjakan mendapat keridhoan dari Allah SWT. Aamiin ya robbal'alamin.

Bukittinggi, 30 Januari 2024

Penulis

Miftahul Fathon

NIM. 1318.009

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL **i**

PERSETUJUAN PEMBIMBING **ii**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI **iii**

PERNYATAAN ORISINALITAS **iv**

ABSTRAK **v**

KATA PENGANTAR **vi**

DAFTAR ISI **viii**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah..... 9

C. Tujuan Penelitian..... 9

D. Manfaat Penelitian..... 10

E. Penjelasan Judul 10

F. Tinjauan Pustaka 14

G. Metode Penelitian..... 17

H. Sistematika Penulisan 20

BAB II KONSEP KEPEMIMPINAN DALAM ISLAM **22**

A. Pengertian dan Tipe Kepemimpinan 22

B. Unsur-Unsur dan Fungsi Kepemimpinan 26

C. Pengertian dan Hakikat Kepemimpinan Dalam Islam..... 29

D. Kriteria Pemimpin Ideal Dalam Islam 33

E. Prinsip-Prinsip Kepemimpinan Dalam Islam..... 36

BAB III KONSEPMASYARAKAT MULTIKULTURAL 39

A. Pengertian Masyarakat Multikultural 39

B. Macam-Macam Masyarakat Multikultural 42

C. Bentuk dan Ciri-Ciri Masyarakat Multikultural 44

BAB IV KEPEMIMPINAN WALI NAGARI PADA MASYARAKAT MULTIKULTURAL DI NAGARI TANJUNG BETUNG TIMUR DALAM PERFEKTIF FIQH SIYASAH

A. Gambaran Lokasi Penelitian 48

B. Kepemimpinan Wali Nagari Dalam Pelaksanaan Pembangunan di dalam Masyarakat multikutural di Nagari Tanjung Betung Timur 55

C. Pandangan fiqh siyasah terhadap Kepemimpinan Wali Nagari Pada Masyarakat Multikultural di Nagari Tanjung Betung Timur 64

BAB V PENUTUP 71

A. Kesimpulan 71

B. Saran 72

DAFTAR PUSTAKA 73

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 78

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang masalah

Kepemimpinan secara etimologi merupakan kemampuan dan kepribadian seseorang dalam mempengaruhi serta membujuk pihak lain agar melakukan tindakan untuk mencapai tujuan bersama sehingga yang yang bersangkutan menjadi struktur awal dari proses kelompok.[1] Kepemimpinan dalam bahasa inggris adalah "*Leadership"* yang berasal dari kata "*Lead"* yang berarti pergi, jadi pemimpin secara umum memiliki gambaran kemana akan pergi artinya suatu arah dimana seseorang dipengaruhi untuk pergi. [2]

Kepemimpinan ini berfungsi atas dasar kekuasaan pemimpin untuk mengajak, mempengaruhi dan menggerakkan orang lain guna melakukan sesuatu demi pencapaian satu tujuan tertentu. Dengan demikian, pemimpin tersebut ada apabila terdapat suatu kelompok atau organisasi.[3] Pemimpin adalah penentu bagi kesejahteraan rakyat, ia juga menempati posisi tertinggi dalam tatanan negara. Dalam kehidupan, pemimpin ibarat kepala dari seluruh anggota tubuh, ia memiliki peranan yang strategis dalam pengaturan pola dan gerakan. Kecakapannya dalam memimpin akan mengarahkan umatnya kepada tujuan yang ingin dicapai, yaitu kejayaan dan kesejahteraan umat dengan iringan Allah SWT, sebagaimana yang tercantum dalam Al-quran Surah al-Baqarah ayat 207:

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّشْرِيْ نَفْسَهُ ابْتِغَآءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ ۗوَاللّٰهُ رَءُوْفٌۢبِالْعِبَاد

[1] Kartini Kartono, *Pemimpin dan Kepemimpinan* (Jakarta: Rajawali, 1983), 38
[2] Al-Djufri, Moh. Salim. *Kepemimpinan* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 6
[3] Kartini Kartono, *Pemimpin*., 44

"Dan diantara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya karena mencari keridhaan Allah, dan Allah maha penyantun kepada hamba-hambanya"

Islam mengajarkan bahwa seorang pemimpin menempati posisi yang sangat penting terhadap perjalan umatnya. Apabila sebuah jama'ah memiliki seorang pemimpin yang prima, serta punyaa keahlian membangkitkan daya juang, maka dapat dipastikan perjalanan umatnya akan mencapai titik keberhasilan. Sebaliknya, Jika suatu jamaah dipimpin oleh yang memiliki banyak kelemahan, serta lebih mengutamakan hawa nafsu dalam mengambil keputusan, maka dapat dipastikan, umat tersebut akan mengalami kemunduran, dan bahkan mengalami kehancuran.

Allah SWT menggariskan bahwa dalam umat harus ada yang menjadi pengganti dan melanjutkan fungsi Islam memandang bahwa pemimpin memiliki posisi yang sangat strategis demi terwujudnya masyarakat yang berada dalam *baldatun toyyibatun wa rabbul ghafur* yaitu masyarakat islam yang menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam sistem kehidupannya, sehingga mencapai tingkat kemakmuran dan kesejahteraan yang merata dengan keadilan bagi seluruh masyarakatnya.[4]

Seorang pemimpin bisa jadi seorang ayah, seorang imam, seorang administrator, seorang manager, atau bahkan seorang pekerja yang berpengaruh. Nabi Saw, menegaskan bahwa setiap orang diberi kepercayaan oleh Allah SWT, untuk menjadi khalifah

Firman Allah dalam QS. an-Nur ayat 55:

[4] Ahmad Tamyis, *Konsep Pemimpin dalam Islam*,(Lampung ; UIN Lampung(skripsi), 2018), 7

وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِى الْاَرْضِ

"Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang saleh sungguh Dia akan menjadikan mereka berkuasa dimuka bumi."

Kepemimpinan dipahami sebagai kekuatan untuk menggerakkan dan mempengaruhi orang. Kepemimpinan sebagai alat, sarana atau proses untuk membujuk orang agar mau melakukan sesuatu secara sukarela. Karena ada beberapa faktor yang dapat menggerakkan orang yaitu ancaman, penghargaan, otoritas dan bujukan.[5] Kepemimpinan dapat dimaknai sekumpulan serangkaian dan sifat-sifat kepribadian yang ada dalam diri pemimpin itu sendiri. Termasuk didalamnya kewibawaan, keterampilan, pengetahuan, visi, dan kompetensi untuk di jadikan sebagai sarana kepemimpinan dalam rangka meyakinkan orang-orang yang dipimpinnya agar mereka mau dan dapat melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya dengan rela, penuh semangat, dan tidak merasa terpaksa. Mengacu pada serangkaian kemampuan dan sifat-sifat tersebut, maka kepemimpinan merupakan kekuatan dinamis yamg berperan penting sebagai memotivasi dan mengkoordinasikan organisasi dalam rangka mencapai tujuan organisasi secara efektif.[6]

Pemimpin adalah dasar bagi terselenggaranya dengan baik ajaran-ajaran agama danpangkal terwujudnya tujuan umat, sehingga kehidupan masyarakat menjadi aman, sejahtera, dan dari kepemimpinan itu dibuat departemen-

[5] Rivai, Veitzhal dan Mulyadi Deddy. *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 3

[6] Saiful Sagala, *Pendekatan dan Model Kepemimpinan cetakan ke-1* (Jakarta : Kencana, 2018), 3

departemen dan pemerintah daerah yang mengurus bidang-bidang dan nilai tersendiri secara khusus, dengan berpedoman pada tuntutan hukum dan ajaran agama, sehingga departemen dan pemerintahan daerah itu mempunyai keseragaman yang solid di bawah pemimpin kepala negara.[7]

Indonesia merupakan negara yang memiliki masyarakat yang multikultural yang terdiri dari berbagai suku, setiap suku memiliki kebudayaan yang berbeda, kelompok etnik atau suku bangsa adalah suatu golongan manusia yang anggotanya mengidentifikasi dirinya dengan sesama, biasanya berdasarkan garis keturunan yang dianggap sama. Identitas sukupun ditandai oleh pengakuan dari orang lain akan ciri khas kelompok tersebut dan oleh kesamaan budaya, bahasa, agama, prilaku atau ciri-ciri biologis.[8]

Masyarakat Indonesia adalah masyarakat majemuk atau "*Plural society*". kemajemukan masyarakat Indonesia disebakan oleh keadaan intern tanah air dan bangsa Indonesia sendiri, adapun yang menjadi faktor-faktor penyebab pluralitas masyarakat Indonesia karena kondisi geografis yang menjadi faktor utama terciptanya pluralitas suku bangsa, masyarakat dalam keberagaman budaya di istilahkan dengan multikulturalisme, yang umumnya di gunakan untuk menjelaskan suatu heterogenitas budaya, atau merujuk pada eksistensi pluralitas etnik dan berbagai kelompok budaya dalam masyarakat. Istilah ini

---

[7] Abu Al-Hasan Al-Mawardi, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Islam*, terj. Abdul Hayyie, Kamaluddin Nurdin (Jakarta : Gema Insani, 2000), 4

[8] Setiadi Kolip, *Pengantar sosiologi pemahaman dan Gejala Permasalahan Sosial* (Bandung : Kencana, 2011), 7

mengedepankan ide bahwa setiap orang dengan berbagai latar belakang budaya yang berbeda-beda dapat hidup berdampingan secara damai.[9]

Akar kata multikultural adalah kebudayaan, pengertian kebudayaan di antara para ahli harus di samakan, atau tidak dipertentangkan antara satu konsep yang di punyai oleh seorang ahli dengan konsep ahli-ahli lainnya. Karena multikulturalisme itu adalah sebuah ideologi dan sebuah alat untuk meningkatkan derajat manusia dari kemanusiaannya, maka konsep kebudayaan harus dilihat dalam perspektif fungsinya bagi kehidupan manusia.[10] Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.[11]

Pemerintahan Nagari adalah pemerintahan terdepan yang merupakan nama lain dari Desa yang diakui dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan peraturan perundan-undangan. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang di akui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan

---

[9] Supriyoko, *Pendidikan Multikultural dan Revitalisasi Hukum adat dalam perspektif Sejarah* (Bandung : Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, 2005), 26

[10] *Ibid.*, 27

[11] Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman, No. 7, Tahun 2017, 3

kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.[12]

Wali nagari merupakan yang bertindak sebagai badan eksekutif yang memimpin dan akan bertanggung jawab kepada masyarakat nagari, gaya kepemimpinan yang membicarakan tentang bagaimana cara Wali nagari memperlakukan masyarakatnya, seorang pemimpin harus mampu mengendalikan egonya. Tetapi hal ini bukan berarti menyembunyikan kepercayaan diri mereka. Meskipun ia harus tetap memiliki kerendahan hati dan jiwanya.[13]

Nagari Tanjung Betung Timur merupakan salah satu Nagari yang ada di Kabupaten Pasaman, Propinsi Sumatera Barat hasil dari sebuah pemekaran pada Tahun 2016 yang masyarakatnya multikultural dan mempunyai beragam budaya. Suku bangsa yang terdapat di nagari Tanjung Betung Timur Kecamatan Rao Selatan, diantaranya suku asli Minangkabau dan suku pendatang, yaitu suku Jawa dan Mandailing. Banyak penduduknya berjumlah 3495 orang. Suku asli Minangkabau merupakan mayoritas masyarakat yang ada di nagari Tanjung Betung Timur karena memiliki jumlah yang lebih banyak dari suku Mandailing dan Jawa, masyarakat yang merupakan suku asli Minagkabau berjumlah 1.876, sedangkan masyarakat dari suku Mandailing berjumlah 1.366 orang, dan selebihnya adalah suku jawa yang berjumlah sekitar 253 orang.[14] Nagari Tanjung Betung Timur ini dipimpin oleh seorang Wali nagari yang berasal dari suku Minang.

---

[12] Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman, No. 1, Tahun, 2017, 4

[13] Zahro Najmatuz, "Pengaruh Gaya Kepemimpinan terhadap semangat Kerja Karyawan Pada KUD", (Malang: UIN Malang (Skripsi), 2005), 3

[14] Arsip Nagari Tanjung Betung Timur 2022

Nagari Tanjung Betung Timur adalah nagari yang memiliki keberagaman budaya yang terdiri dari budaya Minang, Mandailing, dan sebagian kecil memakai budaya Jawa, oleh sebab itu dengan keberagaman budaya itu wali nagari harus mampu menyesuaikan model kepemimpinannya dengan keadaan masyarakat yang memiliki keberagaman budaya itu, apabila wali nagari menjalankan kepemimpinannya didalam masyarakat yang multikultural itu dengan mampu meratakan pembangunan didalam wilayah nagari itu dan tidak mengutamakan golongannya dengan mengenyampingkan pihak lain maka masyarakat akan dapat menerima kepemimpinannya dengan baik, namun penulis melihat di lapangan bahwasan nya wali nagari dalam menjalankan pembangunan tidak merata di berbagai tempat sehingga menumpuk pada satu titik dan penulis juga melihat masih ada keluarga miskin yang seharusnya menerima bantuan tetapi tidak mendapatkan nya sedangkan ada masyarakat yang ekonominya baik tetapi menerima bantuan, hal ini karena masyarakat itu merupakan kerabat atau pendukung dari wali nagari itu sehingga sebagian masyarakat memberikan kritikan dan rasa ketidakpuasan oleh sebagian masyarakat dari sistem pemerintahan yang dijalankan wali nagari.

Nagari Tanjung Betung Timur adalah nagari yang memiliki keberagaman budaya yang terdiri dari budaya Minang, Mandailing, dan sebagian kecil memakai budaya Jawa, oleh sebab itu dengan keberagaman budaya itu wali nagari harus mampu menyesuaikan model kepemimpinannya dengan keadaan masyarakat yang memiliki keberagaman budaya itu, apabila wali nagari menjalankan kepemimpinannya di dalam masyarakat yang multikultural itu dengan mampu

meratakan pembangunan di dalam wilayah nagari itu dan tidak mengutamakan golongannya dengan mengenyampingkan pihak lain maka masyarakat akan dapat menerima kepemimpinannya dengan baik, namun penulis melihat di lapangan bahwasannya wali nagari dalam menjalankan pembangunan tidak merata di berbagai tempat sehingga menumpuk pada satu titik dan penulis juga melihat kurangnya keterbukaan wali nagari dalam melaporkan keadaan keuangan nagari serta dalam pembangunan kadang-kadang masyarakat menerima pembangunan di daerahnya tidak sesuai dengan kesepakatan yang diputuskan dalam musyawarah sehingga masyarakat memperoleh sesuatu yang tidak diprioritaskan oleh masyarakat tersebut untuk dibangun di daerahnya.

Dalam melaksanakan fungsi kepemimpinannya wali nagari harus memiliki keterbukaan informasi sesuai dengan asas keterbukaan pada pasal 24 undang-undang nomor 6 tahun 2014 yang berisi wali nagari harus memberikan informasi tentang pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh wali nagari. Pada praktek pelaksanaan pembangunan di lapangan wali nagari harus memasang informasi seputar pembangunan namun penulis melihat asas keterbukaan tersebut belum terealisasi dengan baik hal in ditandai kurangnya pemasangan papan informasi di lokasi pembangunan.

Dalam konsep *fiqh siyasah* mengatur tentang kepemimpinan yaitu *ulil amri*, meskipun para ulama berbeda pendapat tentang arti ulil amri ini ada yang menafsirkan sebagai kepala nrgara, pemerintahan, yang lebih mendekati kepada makna *ulil amri* adalah *ahlul halli wal aqli* yang menurut para ulama yaitu tempat

berkonsultasi atau imam dalam menentukan kebijakan, sama halnya dalam pemerintahan nagari yang dipimpin oleh wali nagari.

Dari konsep *fiqh siyasah* di atas wali nagari sebagai penentu kebijakan harus mampu menerapkan prinsip keadilan dan keterbukaan kepada masyarakat yang dipimpinnya apalagi masyarakat yang multikultural yang memiliki berbagai macam budaya, wali nagari harus mampu memposisikan dirinya sebagai orang yang mengayomi masyarakat sehingga pembangunan berjalan dengan adil, tidak tertumpu pada satu tempat, mengundang masyarakat untuk bermusyawarah untuk menemukan ide atau gagasan untuk membangun apa yang dibutuhkan oleh masyarakat tersebut, di samping itu wali nagari harus menjunjung tinggi asas keterbukaan, menerima saran dan masukan dari masyarakat.

Observasi penulis di nagari Tanjung Betung Timur penulis melihat bahwa wali nagari belum sepenuhnya menjunjung tinggi prinsip keadilan dan keterbukaan dalam *fiqh siyasah* sehingga banyak pembangunan menumpuk pada satu titik atau satu masyarakat saja sehingga masyarakat yang lainnya tidak menikmati hasil dari pembangunan tersebut di samping itu wali nagari kadang-kadang melakukan pemberdayaan masyarakat yang tidak adil sehingga masyarakat dari suku yang lain merasa kurang di perhatikan oleh wali nagari.

Dari latar belakang di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan mewujudkan nya dalam sebuah karya ilmiah dengan judul: **Kepemimpinan Wali Nagari Pada Masyarakat Multikultural Dalam perpektif *Fiqh Siyasah* Di Nagari Tanjung Betung Timur Kecamatan Rao Selatan.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah dan batasan masalah, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kepemimpinan Wali Nagari dalam pelaksanaan pembangunan di dalam masyarakat multikultural di Nagari Tanjung Betung Timur ?
2. Bagaimana pandangan *fiqh siyasah* terhadap kepemimpinan Wali Nagari dalam masyarakat multikultural di Nagari Tanjung Betung Timur ?

C. Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui kepemimpinan Wali Nagari dalam pelaksanaan pembangunan di dalam masyarakat multikultural di Nagari Tanjung Betung Timur.
2. Untuk mengetahui pandangan *fiqh siyasah* terhadap kepemimpinan Wali nagari dalam masyarakat multikultural di Nagari tanjung Betung Timur.

D. Manfaat penelitian

1. Untuk menambah khazanah keilmuan bagi peneliti dan bagi pembaca tentang model kepemimpinan Wali nagari dalam masyrakat multikultural
2. Memenuhi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana Hukum dalam bidang Hukum Tatanegara (Siyasah) pada prodi Hukum Tatanegara fakultas Syariah UIN
3. Sebagai bahan kajian lebih lanjut bagi para peneliti sejenis

E. Penjelasan judul

Untuk menghindari keraguan dan kesalahpahaman dalam memahami judul skripsi ini, maka penulis akan menjelaskan kata-kata penting yang terkandung pada judul di atas diantaranya:

Kepemimpinan secara etimologi merupakan kemampuan dan kepribadian seseorang dalam mempengaruhi serta membujuk pihak lain agar melakukan tindakan untuk mencapai tujuan bersama sehingga yang bersangkutan menjadi struktur awal dari proses kelompok.[15] Sedangkan menurut Wahjosumidjo, kepemimpinan dapat didefinisikan sebagai kemampuan seseorang mempengaruhi orang lain untuk berfikir dan berperilaku dalam rangka perumusan dan pencapaian tujuan organisasi didalam situasi tertentu.[16] Kepemimpinan dipahami sebagai kekuatan untuk menggerakkan dan mempengaruhi orang, kepemimpinan juga bisa dipahami sebagai alat, sarana atau proses untuk membujuk orang lain agar mau melakukan sesuatu secara sukarela karena ada beberapa faktor yang dapat menggerakkan orang lain berupa ancaman, penghargaan, otoritas, dan bujukan.[17]

Berbagai berbagai pengertian kepemimpinan dapat disimpulkan bahwa kepe mimpinan adalah seni untuk mempengaruhi anggotanya tanpa adanya paksaan agar mampu diajak bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama. Pemimpin yang baik dalam islam adalah orang yang diberi kepercayaan masyarakat untuk memimpin bukan ia yang semata-mata hanya gila akan kekuasaang. Seorang

---

[15] Kartini Kartono, *Pemimpin dan Kepemimpinan*, (Jakarta: Rajawali, 1983), 38

[16] Wahjosumidjo, *Kepemimpinan dan Motivasi* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994), 26

[17] Rivai, Veitzhal dan Mulyadi Deddy, *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 2

pemimpin harus bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, tanggung jawab kepada tuhan, diri sendiri juga terhadap masyarakat yang dipimpinnya.

Nagari adalah nama tradisional dan unit politik sebuah organisasi sosial politik Minangkabau sejak zaman pra kolonial yang memiliki pemerintahan sendiri. Nagari telah berdiri sendiri sebagai sistem pemerintahan. Menurut Wikipedia, Nagari merupakan pembagian wilayah administratif sesudah Kecamatan di Provinsi Sumatera Barat, istilah Nagari merupakan penyebutan lain dari Desa di Minangkabau. Hal ini sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan: Penyebutan Desa / Desa Adat yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyebutannya di sesuaikan dengan penyebutan yang berlaku di daerah setempat.[18] Secara antropologis Nagari merupakan kesatuan bagi berbagai perangkat tatanan sosial-budaya.

Pengakuan Nagari sebagai kesatuan masyarakat hukum adat terdapat pada pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang.[19]

Adapun sistem pemerintahan Nagari antara lain yaitu Nagari dipimpin oleh Wali Nagari. Wali Nagari dipilih oleh penduduk Nagari secara Demokratis,

---

[18] Chairul Anwar, *Hukum Adat Indonesia Meninjau Adat Minangkabau,*(Jakarta: PT. Rhineka Cipta,1997), 24

[19] Afdhal Prima, "Sistem Pemerintahan Nagari (Studi Pada Nagari Padang Magek Kabupaten Tanah Datar", *Jurnal FISIP* 1, no. 2 (2014), 2

biasanya yang dipilih adalah orang yang dianggap paling menguasai tentang semua aspek kehidupan dalam budaya minangkabau, sehingga Wali Nagari tersebut mampu menjawab semua persoalan yang di hadapi oleh Masyarakat di nagari.

Kata masyarakat berasal dari bahasa Arab yaitu *musyariak*, yang artinya bersama-sama. Dalam bahasa Inggris dipakai istilah *society* yang berasal dari kata latin sociaus yang artinya kawan. Masyarakat adalah manusia yang hidup bersama di suatu wilayah tertentu dalam waktu yang cukup lama yang saling berinteraaksi dan berhubungan dan mempunyai kebiasaan, sikap, dan perasaan persatuan yang sama.[20] M.J. Herskovits menyatakan, masyarakat adalah kelompok individu yang diorganisasikan, yang mengikuti satu cara hidup tertentu.

Sedangkan JL. Gillin dan J.P. Gillin mengatakan bahwa masyarakat adalah kelompok manusia terbesar yang mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap, dan perasaan persatuan yang sama. S.R. Steinmetz, memberikan batasan mengenai masyarakat sebagai kelompok manusia yang terbesar meliputi pengelompokan manusia yang lebih kecil yang mempunyai perhubungan erat dan teratur. Pendapat dari Maclver yang mengatakan bahwa masyarakat adalah satu sistem cara kerja dan prosedur, dari otoritas dan saling membantu yang meliputi kelompok-kelompok dan pembagian-pembagian sosial lainnya, sistem pengawasan tingkah laku manusia dan kebebasan, sistem yang kompleks dan selalu berubah, atau jaringan relasi sosial.[21]

---

[20] Parsudi Suparlan, "Menuju Masyarakat Indonesia yang Multikultural",*Jurnal Antropologi Indonesia*, no. 69 (2002), 127

[21] Beni Ahmad Saebani, *Pengantar Antropologi*,(Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), 137

Multikultural secara etimologi berasal dari kata multi yang berarti banyak, dan kultur yang berarti kebudayaan, jadi multikultural adalah beragam kebudayaan. [22] Kultur atau kebudayaan itu sendiri tidak lepas dari empat hal yaitu aliran agama, ras, suku, dan kebudayaan. Hal ini menunjukkan bahwa multikultural tidak hanya terkait dengan perbedaan budaya tetapi juga keberagaman agama, ras, dan etnis. Menurut Abdullah Multikulturalisme merupakan pemahaman yang menekankan pada disparitas dan persamaan budaya lokal tanpa mengabaikan hak dan eksistensi budaya yang ada. Dengan kata lain, penekanan multikulturalisme terletak pada kesetaraan budaya.[23]

Makna multikulturalisme menegaskan bahwa semua perbedaan pasti sangat di akui. Multikulturalisme di posisikan seabagai respon terhadap keberagaman, dengan kata lain, keberadaan komunitas yang berbeda tidaklah cukup, karena yang terpenting komunitas itu dibutuhkan oleh masyarakat dan negara. Multikultural berasal dari dua kata, yaitu multi yang berarti banyak, dan kultur yang berarti kebudayaan. Masyarakat multikultural berarti masyarakat yang memiliki bermacam kebudayaan, misalnya ilmu pengetahuan, sistem kekerabatan, bahasa, religi, kesenian, tekhnologi, dan sistem mata pencaharian hidup. Multikultural juga dapat diartikan keberagaman dan perbedaan terhadap suatu kebudayaan dengan kebudayaan yang lain. Sehingga masyarakat multikultural dapat diartikan sebagai sekelompok manusia yang tinggal dan hidup menetap di suatu tempat yang memiliki kebudayaan dan ciri khas tersendiri yang membedakan antara satu masyarakat dengan masyarakat yang lain. Setiap

[22] Hujair AH. Sanaky, *Dinamika perkembangan Pendidikan Islam di Indonesia,*(Yogyakarta: Kaukaba, 2016), h. 186

[23] Abdullah, "Multikulturalisme",Kompas,16 Mei 2022, 2

masyarakat akan menghasilkan kebudayaannya masing-masing yang akan menjadi ciri khas bagi masyarakat tersebut.[24]

Berdasarkan penjelasan kata demi kata di atas, maka secara keseluruhan judul ini maksudnya adalah kepemimpinan wali nagari dalam pelaksanaan pembangunan pada masyarakat multikultural dalam pandangan *fiqh siyasah* di nagari Tanjung Betung Timur.

F. Tinjauan Pustaka

Agar tidak terjadinya kesalahan dalam memahami masalah yang saya bahas, sejauh ini penulis sudah mengamati ada beberapa yang telah membahas tentang penelitian ini. Berkaitan dengan penelitian yang Penulis lakukan, ada beberapa Penelitian terdahulu yang berkaitan diantaranya adalah:

1) Skripsi Mia Arta Octavia Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung Bandar Lampung Tahun 2018, yang berjudul Kepemimpinan Kepala Desa dalam Meningkatkan Partisipasi Perempuan pada Perempuan Desa (Studi pada Kampung Jaya Sakti Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah)

- Bagaimanakah peran kepemimpinan yang digunakan kepala Kampung Jaya Sakti dalam meningkatkan partisipasi perempuan pada pemerintahan desa.
- Apakah motivasi perempuan mau berpartisipasi aktif pada pemerintahan desa di Kampung Jaya Sakti.

Penelitian ini berawal dari rendahnya partisipasi perempuan di desa terutama pada pemerintahan desa di Indonesia yang salah satunya disebabkan oleh kurang nya dukungan dan kesadaran masyarakat bahwa partisipasi perempuan

[24] *Ibid.,* 3

merupakan bentuk pengarusutamaan gender. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kepala Kampung Jaya Sakti berperan dalam meningkatkan partisipasi perempuan pada pemerintahan di Kampung Jaya Sakti. Perempuan Kampung Jaya Sakti juga memiliki kesadaran diri untuk mau berpartisipasi aktif dalam pemerintahan desa. Akan tetapi Kepala Kampung belum dapat menjelaskan bagaimana pentingnya partisipasi perempuan. Kepala Kampung sebagai pemimpin seharusnya dapat menegaskan kepada masyarakat terutama kaum perempuan tentang pentingnya partisipasi masyarakat untuk kemajuan kampung dalam pengarusutamaan gender di tingkat desa.

Persamaan dalam penelitian ini sama sama meneliti tentang kepemimpinan Kepala Desa Atau Wali nagari,perbedaanya yaitu dalam penelitian yang dilakukan oleh Mia Arta Octavia ini menjelaskan tentang kepala desa dalam peningkatan partispasi perempuan, tetapi dalam penelitian ini menjelaskan tentang kepemimpinan Wali Nagari pada Masyarakat multikultural menurut Pandangan fiqh siyasah.

2) Skripsi Roudlotus Tsaniyah mahasiswa Universitas Islam Negeri sunan Ampel 2019, yang berjudul Gaya Kepemimpinan Kepala Desa (Studi di Desa Karangkaten Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto).

- Bagaimana peran kepala Desa dalam peningkatan partisipasi masyarakat di Desa Karangkuten Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto.

Penelitian ini berawal desa Karangkuten ini memiliki potensi yang sangat besar mulai dari sumber daya alam, sumber daya manusia, dan kelembagaan/organisasi. Namun dalam pemanfaatan seluruh potensi yang ada

masih belum optimal dalam pemberdayaannya. Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang kepemimpinan Kepala Desa/Wali Nagari, perbedaannya dalam penelitian yang dilakukan oleh Roudlotus Tsaniyah ini adalah gaya kepemimpinan Kepala Desa dalam pengoptimalan pemberdayaan potensi-potensi yang ada di Desa Karangkuten, Kecamatan Gondan, Kabupaten Mojokerto. Sedangkan dalam penelitian ini membahas tentang bagaimana kepemimpinan Wali Nagari pada masyarakat multikultural di Nagari Tanjung Betung Timur.

3) Skripsi Timo Cahyo Nugroho mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang 2020, yang berjudul Multikulturalisme Dalam Kehidupan Beragama Berbasis Nilai Kearifan Lokal (Studi pada Masyarakat Desa Balun, Kecamatan Turi, Kabupaten Lamongan).

- Bagaimanakah kondisi keberagaman umat beragama di Desa balun, Kecamatan turi, Kabupaten Lamongan.
- Bagaimanakah strategi memasyarakatkan nilai kearifan lokal bagi kehidupan masyarakat lintas agama di Desa Balun, Kecamatan Turi, Kabupaten Lamongan.

Penelitian ini berawal dari keberagaman agama masyarakat di desa Balun,Kecamatan Turi, Kabupaten Lamongan. Kemajemukan dan keberagaman yang menjadi identitas nasional bangsa Indonesia dapat dicontohkan dan ditemukan di Desa Balun. Keberagaman agam yang terdapat di Desa Balun bukan sebagai pembeda antara masyarakat lintas agama, tetapi justru menjadi pemersatu masyarakat yang plural. Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama

membahas tentang masyarakat yang multikultural. Perbedaannya adalah penelitian Timo Cahyo Nugroho ini membahas tentang Multikulruralisme dalam kehidupan beragama berrbasis nilai kearifan lokal di Desa Balun, Kecamatan Turi, Kabupaten Lamongan. Sedangkan dalam penelitian ini membahas tentang bagaimana kepemimpinan Wali Nagari pada masyarakat multikultural di Nagari Tanjung Betung Timur, Kecamatan Rao Selatan, Kabupaten Pasaman.

G. Metode penelitian

Metodologi penelitian adalah suatu cara atau jalan untuk memperoleh kembali pemecahan terhadap segala permasalahan. Dalam melakukan penelitian, membutuhkan data-data yang dapat memberikan kebenaran dari suatu ilmu pengetahuan. Maka penelitian itu dapat didefinisikan sebagai suatu usaha untuk menemukan, mengembangkkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha mana dilakukan dengan metode-metode ilmiah. Metode-metode tersebut sangat penting untuk menunjang hasil yang nantinya diperoleh dari penelitian yang dilakukan, sehingga mendapatkan data dengan gambaran yang jelas mengenai permasalahan yang teliti. Pemilihan metode juga merupakan salah satu penentuan dari kesempurnaan suatu penelitian, metode-metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Jenis Penelitian

Penelitian yang akan penulis lakukan ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan data utama yang digunakan berasal dari informan-informan penelitian yang ada di daerah atau tempat penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang analisis datanya lebih

mengacu kepada pendeskripsian data-data yang didapatkan melalui informasi adari informan dan dituliskan dalam bentuk kata-kata atau kalimat-kalimat verbal dan bukan dalam bentuk angka-angka.

b. Sumber Data

Ada dua jenis sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer merupakan data-data utama yang diambil dari informan utama sesuai dengan tema penelitian ini, adapun sumber data primer yang penulis gunakan di sini adalah Wali nagari, BAMUS, Wali Jorong dan 9 orang masyarakat nagari Tanjung Betung Timur. Adapun sumber data sekunder merupakan informan-informan penunjang atau tambahan untuk memperkuat dan membantu menganalisis dan memperkuat data-data yang didapatkan dari sumber data primer di atas, sumber data sekunder yang penulis gunakan adalah buku-buku kepustakaan dan dokumen-dokumen lainnya.

c. Metode Pengumpulan Data

Berdasarkan sumber yang penulis kemukakan sebelumnya maka metode pengumpulan data yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode dalam mengumpulkan data-data penelitian lapangan terdapat dua bentuk wawancara yang biasa dilakukan oleh peneliti, yaitu wawancara terstruktur dan wawancara bebas. Wawancara terstruktur merupakan wawancara dengan mempersiapkan secara sistematis dan berurutan pertanyaan-pertanyaan yang akan dijawab oleh informan, adapun wawancara bebas merupakan cara wawancara dengan menyiapkan ide pada

peneliti tanpa menyusun satu persatu pertanyaan secara sistematis dalam hal ini penulis lebih cenderung menggunakan metode wawancara bebas agar tidak kaku saat berinteraksi dengan informan. Penulis juga melakukan dua langkah dalam wawancara ini yaitu wawancara secara langsung atau tatap muka dan wawancara dengan menggunakan sosial media seperti Whatsaap apabila informan tidak bisa ditemui.

b. Observasi

Observasi merupakan pengamatan secara langssung sebuah peristiwa yang terjadi di lapangan. Observasi ini dilakukan untuk menguatkan data wawancara yang sudah penulis lakukan terhadap informan penelitian.

d. Lokasi Penelitian

Sesuai dengan judul yang penulis angkat lokasi peneltian bertempat di nagari Tanjung Betung Timur Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman.

e. Metode Analisis Data

Data-data yang telah dikumpulkan akan disusun dalam sebuah tulisan dengan menggunakan analisis kualitatif dalam bentuk deskriptif. Analisis deskriptif yang dimaksud adalah menjelaskan kembali setiap data yang ditemui agar mendapatkan gambaran yang lebih jelas di samping itu analisis data juga menggunakan teori deduktif dan induktif. Metode deduktif merupakan teori pengambilan kesimpulan berdasarkan ketentuan yang umum, sedangkan metode induktif merupakan teori pengambilan kesimpulan yang bersumber dari peristiwa-peristiwa atau data-data yang khusus dan untuk selanjutnya diambil kesimpulan yang bersifat umum.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penyusunan Skripsi ini Penulis akan menguraikan secara umum setiap bab yang meliputi beberapa sub bab, yaitu sebagai berikut:

Bab I penulis akan memaparkan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat Penelitian, Penjelasan judul, penelitian terdahulu dari tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II penulis akan membahas tentang pengertian dan tipe-tipe kepemimpinan, unsur dan fungsi kepemimpinan, kepemimpinan dalam Islam, kriteria pemimpin ideal menurut Islam, dan prinsip-prinsip kepemimpinan dalam Islam

Bab III penulis akan membahas tentang pengertian masyarakat multikultural, macam-macam masyarakat multikultural, bentuk dan ciri-ciri masyarakat multikultural.

Bab IV penulis akan membahas tentang kepemimpinan Wali nagari dalam pelaksanaan pembangunan dalam masyarakat multikultural di Nagari Tanjung Betung Timur, pandangan fiqh siyasah terhadap kepemimpinan Wali Nagari dalam masyarakat multikultural di Nagari Tanjung Betung Timur.

Bab V berisi tentang kesimpulan dari pembahasan yang telah di uraikan pada bab-bab sebelumnya disertai saran dan pendapat.

BAB II
KONSEP KEPEMIMPINAN DALAM ISLAM

A. Pengertian dan Tipe Kepemimpinan

1. Pengertian Kepemimpinan

Kepemimpinan secara etimologi berasal dari kata "Pimpin" yang berarti tuntun, bina atau bimbing, dapat pula berarti menunjukan jalan yang baik atau benar, tetapi dapat pula berarti mengepalai pekerjaan atau kegiatan.[1] Kepemimpinan dapat juga didefinisikan sebagai seni mempengaruhi dan mengarahkan orang dengan cara kepatuhan, kepercayaan, dan kerjasama yang bersemangat dalam mencapai tujuan bersama.[2] Kepemimpinan menurut House dalam bukunya Gary Yuki adalah kemampuan individu untuk mempengaruhi, memotivasi, dan membuat orang lain mampu memberikan kontribusinya demi efektivitas dan keberhasilan organisasi. George R. Terry dalam bukunya Miftah Thoha merumuskan bahwa kepemimpinan itu adalah aktivitas untuk mempengaruhi orang-orang supaya diarahkan mencapai tujuan organisasi.[3]

Kepemimpinan adalah suatu proses kegiatan untuk menggerakkan orang lain dengan memimpin, membimbing, mempengaruhi orang lain, untuk melakukan sesuatu agar tercapai hasil yang diharapkan.[4] Kepemimpinan juga sebagai salah satu fungsi manajemen merupakan hal yang sangat penting untuk mencapai tujuan organisasi, kepemimpinan seolah-olah dipaksa untuk

---

[1] Departemen *Pendidikan dan kebudayaan*, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta : PN Balai Pustaka, 1990), 684

[2] Rivai, *Kepemimpinan Pendidikan* (Jakarta: Cahaya Ilmu, 2003), 3

[3] Gary Yuki, *Kepemimpinan dalam Organisasi*, Edisi 5, terj. Budi Supriyanto (Jakarta:PT. Indeks, 2009), 4

[4] Edi Sutisno, *Manajemen Sumber Daya Manusi* (Jakarta: Kencana Prenanda Media Group,2009),213

menghadapai berbagai macam faktor seperti struktur atau tantangan, kekuasaan dan kondisi lingkungan organisasi. Sebaliknya, kepemimpinan dapat dengan mudah menjadi satu alat penyelesaian yang luar biasa terhadap persoalan yang menimpa suatu organisasi tersebut, saat organisasi itu berada dalam pimpinannya.[5]

Para pakar manajemen telah banyak memberikan tentang pengertian dan teori kepemimpinan dalam rangka mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien, hal tersebut disebabkan organisasi tidak dapat dipisahkan dengan kepemimpinan. Kepemimpinan adalah suatu kegiatan mempengaruhi orang lain agar orang tersebut mau bekerja sama dan mengolaborasikan potensinya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.[6] Berhasil tidaknya suatu organisasi salah satunya ditentukan oleh kepemimpinan yang memimpin organisasi bahkan maju mundurnya suatu organisasi sering di identikkan dengan perilaku kepemimpinan dari pimpinannya.

Pemimpin harus bertanggungjawab terhadap pelaksanaan organisasi atau lembaga yang dipimpin, hal ini menempatkan posisi pemimpin sangat penting dalam suatu organisasi atau pada lembaga tertentu. Sementara itu Nawawi mendefinisikan kepemimpinan sebagai kemampuan menggerakkan, memberi motivasi dan mempengaruhi orang-orang agar bersedia melakukan tindakan-tindakan yang terarah pada pencapaian tujuan melalui keberanian mengambil keputusan tentang kegiatan yang harus dilakukan.[7]

---

[5] Pandji Anoraga, *Manajemen Bisinis,* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 182

[6] Baharudin dan Uniarso, *Kepemimpinan Pendidikan Islam Antara Teori dan Praktik* (Yogyakarta: AR-RUZZ MEDIA, 2012), 48

[7] Hadari Nawawi, *Administrasi Pendidikan* (Jakarta: Haji Mas Agung, 1987), 81

Kepemimpinan secara luas meliputi proses mempengaruhi dalam menentukan tujuan dalam menentukan tujuan organisasi dalam memotivasi perilaku pengikut untuk mencapai tujuan, untuk mempengaruhi dan memperbaiki kelompok dan budayanya, selain itu juga mempengaruhi interprestasi mengenai peristiwa-peristiwa para pengikutnya, pengorganisasian dan aktivitas-aktivitas untuk mencapai sasaran dalam memelihara hubungan kerja sama dan kerja kelompok serta memperoleh dukungan dan kerja sama dari orang-orang diluar kelompok atau organisasi. Menurut Wahjosumidjo, dalam praktek organisasi, kata "Memimpin" mengandung konotasi menggerakkan, mengarahkan, membimbing, melindungi, membina, memberikan teladan, memberikan dorongan, memberikan bantuan, dan sebagainya.[8]

Berdasarkan uraian tentang definisi kepemimpinan di atas, terlihat bahwa unsur kunci kepemimpinan adalah pengaruh yang dimiliki seseorang dan pada gilirannya akibat pengaruh itu bagi orang yang hendak dipengaruhi. Peranan penting dalam kepemimpinan adalah upaya seseorang yang memainkan peran sebagai pemimpin guna mempengaruhi orang lain dalam organisasi / lembaga tetentu untuk mencapai tujuan.

2. Tipe Kepemimpinan

Adapun beberapa tipe kepemimpinan sebagai berikut:

a. Tipe otokratik

Tipe pemimpin otokratik adalah tipe pemimpin yang memperlakukan organisasi yang dipimpinnya sebagai milik pribadi, sehingga hanya kemauannya

[8] Soehardjono, *Kepemimpinan: Suatu Tinjauan singkat tentang Pemimpin dan Kepemimpinan serta Usaha-usaha Pengembangannya* (Malang: APDN Malang Jawa Timur,1998), 1

sajalah yang harus berlangsung dan kurang mau memperhatikan kritik dari bawahanya. Ia berfikir bahwa mereka yang dipimpin itu semata-mata bawahannya. Oleh sebab itu, biasanya ia tertutup terhadap kritik, saran dan pendapat orang lain. Ia beranggapan bahwa seolah-olah pikiran dan pendapatnya yang paling benar, karena itu harus dilaksanakan dan dipatuhi secara mutlak.[9]

b. Tipe Paternalistik

Kepemimpinan paternalistik adalah model kepemimpinan yang mana pimpinan menganggap orang yang dipimpin tidak pernah dewasa, karenanya ia jarang memberikan kesempatan kepada yang dipimpinnya untuk mengembangkan daya kreasi, inisiatif dan mengambil keputusan dalam bidang tugas yang dibebankan kepadanya. Kepemimpinan model ini telah menonjolkan figur, dan biasanya jika figurnya wafat, maka organisasi akan menjadi stagnan, mundur atau runtuh. Tipe pemimpin paternalistik hanya terdapat dilingkungan masyarakat yang bersifat tradisional, umumnya dimasyarakat agraris.[10]

c. Tipe Kharismatik

Tipe kepemimpinan yang memiliki ciri kepribadian yang istimewa atau sifat wibawa yang tinggi sehingga sangat dikagumi dan mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap bawahan atau pengikutnya. Umumnya diketahui bahwa pemimpin yang demikian mempunyai daya tarik yang amat besar dan pada umumnya mempunyai pengikut yang sangat besar.[11]

---

[9] Sondang P.Siagian,*Tipe-Tipe Kepemimpinan* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009), 63

[10] *Ibid.*,64

[11] Kartini Kartono,*Pemimpin.*, 91

d. Tipe Demokrasi

Kepemimpinan demokrasi adalah sebuah model kepemimpinan yang mana pemimpinya berusaha menyinkronkan antara kepentingan dan tujuan organisasi dengan kepentingan dan tujuan orang yang di pimpinya. Pemimpin model ini biasanya lebih mengutamakan kerjasama. Ia lebih terbuka, mau dikritik dan menerima pendapat dari orang lain dalam mengambil keputusan dan kebijakasanaan lebih mengutamakan musyawarah.[12]

e. Tipe Laissez Faire

Tipe kepemimpinan ini praktis pemimpin tidak memimpin, dia membiarkan kelompoknya dan setiap orang berbuat sebebasnya, pemimpin tidak ikut sedikitpun dalam melaksanakan pekerjaan. Semua pekerjaan dan tanggungjawab harus dilakukan oleh bawahannya sendiri pemimpin hanya berfungsi sebagai simbol, tidak memiliki kecakapan teknis, tidak mempunyai jiwa kepemimpinan, tidak bisa mengontrol anak buah, tidak mampu melaksanakan koordinasi kerja, tidak mampu menciptakan hubungan kerja yang baik kedudukan sebagai pemimpin biasanya diperoleh dengan cara penyogoka, suapan atau karena nepotisme oleh karena itu organisasi yang dipimpinnya bisanya kacau balau.[13]

B. Unsur-Unsur dan Fungsi Kepemimpinan

1. Unsur-unsur kepemimpinan

a. Adanya pemimpin

Unsur pertama dari kepemimpinan adalah adanya pemimpin yakni seorang yang mendorong dan mempengaruhi atau sekelompok orang lain. Sehingga

[12] Harbani Pasolong, *Kepemimpinan Birokrasi* (Bandung: Alfabeta, 2013), 46
[13] *Ibid.,47*

tercipta hubungan kerja yang serasi dan menggantungkan aktivitas tertentu untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

b. Adanya Pengikut

Adanya pengikut yakni seseorang atau sekelompok orang mendapat dorongan atau pengaruh sehingga bersedia dan dapat melakukan aktivitas-aktivitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.

c. Adanya Sifat dan Perilaku Tertentu

Adanya sifat dan perilaku tertentu yang dimiliki oleh pemimpin yang dapat memanfaatkan untuk mendorong atau mempengaruhi orang lain.

d. Adanya Situasi dan Kondisi Tertentu

Adanya situasi dan kondisi tertentu yang memungkinkan terlaksananya kepemimpinan. Situasi dan kondisi yang dimaksud dibedakan menjadi dua macam: pertama situasi dan kondisi yang terdapat dalam organisasi, yang kedua situasi dan kondisi yang terdapat diluar organisasi yakni lingkungan secara keseluruhan.[14]

2. Fungsi Kepemimpinan

Pemimpin yang berhasil adalah pemimpin yang mampu mengelola serta mengatur organisasi secara efektif dan mampu melaksanakan kepemimpinan secara efektif, dengan demikian pemimpin harus betul-betul menjalankan fungsinya sebagai seorang pemimpin.

Adapun beberapa fungsi kepemimpinan sebagai berikut:

---

[14] Pandji Anoraga, *Manajemen Bisinis,* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 184

a) *Planning*

Perencanaan (*Planning*) dapat didefinisikan sebagai keseluruhan proses dan penentuan secara matang dari hal-hal yang akan dikerjakan dimasa yang akan datang dalam rangka pencapaian tujuan yang telah di tentukan.[15]

b. *Organizing*

Pengorganisasian (*organizing*) adalah keseluruhan pengelompokan orng-orang, alat-alat, tugas-tugas, tanggungjawab, dan wewenang sehingga tercipta suatu organisasi yang dapat digerakkan sebagai suatu kesatuan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan.[16]

c. *Actuating*

Pergerakan (*actuating*) adalah segala tindakan untuk menggerakkan orang-orang dalam suatu organisasi, agar dengan kemauan penuh berusaha mencapai tujuan organisasi dengan berlandaskan pada perencanaan yang telah ada.[17]

d. *Motivating*

Memotivasi (*motivating*) adalah pemberian daya penggerak yang menciptakan kegairahan kerja agar mau bekerja sama, bekerja efektif dan terintegrasi dengan segala daya dan upaya untuk mencapai kepuasan kerja.[18]

e.*Controlling*

Pengendalian (*controlling*) adalah proses pengaturan berbagai faktor dalam suatu organisasi agar sesuai dengan rencana-rencana yang telah ditetapkan dalam

---

[15] Susilo Martoyo, Pengetahuan Dasar Manajemen dan Kepemimpinan (Yogyakarta: BPFE 1988), 33

[16] *Ibid*., 87

[17] *Ibid.*, 116

[18] Malayu S,P. Hasibuan, *Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), 219

rangka mencapai tujuan organisasi dapat terselenggara.[19]

e. *Evaluating*

Penilaian (*evaluating*) adalah pengukuran dan perbandingan hasil-hasil pekerjaan yang nyatanya dicapai dengan hasil-hasil yang seharusnya dicapai.[20]

C. Pengertian dan Hakikat Kepemimpinan dalam Islam

Islam adalah agama yang komprehensif, ia tidak hanya mengatur cara manusia menyembah Tuhannya, tetapi juga mengatur segala sendi kehidupan. Mulai dari tata cara hidup bermasyarakat, menuntut ilmu, bahkan juga mengatur tata negara dan kepemimpinan.[21] Pemimpin dan kepemimpinan dalam Islam telah diatur dalam hukum Syari'at Islam. Setiap manusia pasti menyandang predikat sebagai seorang pemimpin, baik dalam tingkatan tinggi (pemimpin umat/negara) maupun dalam tingkatan yang paling rendah, yaitu pemimpin bagi diri sendiri. Setiap bentuk kepemimpinan membutuhkan suatu keahlian. Kepemimpinan tidak bisa dijalankan hanya dengan kemampuan seadanya. Sebab, yang pasti hal itu akan menimbulkan gejolak di antara personil-personil yang dipimpinnya.[22]

Kepemimpinan merupakan salah satu tanggungjawab yang sangat besar karena hal itu merupakan amanah dari Allah, baik atau tidaknya sebuah kepemimpinan disebabkan oleh faktor pemimpin itu sendiri. Untuk itu di dalamnya ada dua pihak yang berperan antara lain yang dipimpin dan yang

---

[19] Malayu S,P. Hasibuan, *Organisasi dan Motivasi* (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), 21

[20] Sondang P. Siagian, *Fungsi-Funsi Manajerial* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005).33

[21] Hepi Andi Bastoni, *Sejarah Para Khalifah* (Bogor: Pustaka Al-kautsar, 2009), 9

[22] Muhammad Abdul Jawwad, *Trik Cerdas Memimpin Cara Rasulullah* ,terj. Abdurrahman Jufri, (Solo: Pustaka Iltizam, 2009), 10

memimpin (Imam).[23] Konsep kepemimpinan dalam Islam sebenarnya memiliki dasar-dasar yang sangat kuat dan kokoh.Ia dibangun tidak saja oleh nilai-nilai transendental, namun telah dipraktekkan sejak berabad-abad yang lalu oleh nabi Muhammad SAW, para Shahabat dan Khulafa' Al-Rasyidin. Pijakan kuat yang bersumber dari al- Qur'an dan Hadis Rasulullah SAW serta dengan bukti empiriknya telah menempatkan konsep kepemimpinan Islam sebagai salah satu model kepemimpinan yang diakui dan dikagumi oleh dunia internasional

Secara etimologi kepemimpinan berarti *Khilafah, Imamah, Imaroh*, yang mempunyai makna daya memimpin atau kualitas seorang pemimpin atau tindakan dalam memimpin.[24] Sedangkan secara terminologinya adalah suatu kemampuan untuk mengajak orang lain agar mencapai tujuan-tujuan tertentu yang telah ditetapkan[25] dengan kata lain, kepemimpinan adalah upaya untuk mentransformasikan semua potensi yang terpendam menjadi kenyataan.

Tugas dan tanggungjawab seorang pemimpin adalah menggerakkan dan mengarahkan, menuntun, memberi motivasi serta mendorong orang yang dipimpin untuk berbuat sesuatu untuk mencapai tujuan. Sedangkan tugas dan tanggung jawab yang dipimpin adalah mengambil peran aktif dalam menjalankan pekerjaan yang dibebankan tanpa adanya kesatuan komando yang didasarkan atas satu perencanaan dan kebijakan yang jelas, maka rasanya sulit diharapkan tujuan yang telah ditetapkan akan tercapai dengan baik.

---

[23] Ernita Dewi, *Menggagas Kriteria Pemimpin Ideal*,cet ke-1 (Yogyakarya: AK Group, 2006), 2

[24] Muhammad Idris Marbawi, *Kamus Idris Al-Marbawy*, juz 1, (Mesir: Mustafa Al-Halaby wa Auladuhu, 1359 H), 28

[25] Abdul Mujieb, *Kamus Istilah Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), 120

Dalam pandangan Islam, kepemimpinan merupakan amanah dan tanggung jawab yang tidak hanya dipertanggungjawabkan kepada anggota-anggota yang dipimpinya, tetapi juga akan dipertanggung jawabkan dihadapan Allah Swt. Jadi, pertanggung jawaban kepemimpinan dalam Islam tidak hanya bersifat horizontal-formal sesama manusia, tetapi bersifat vertical-moral, yakni tanggung jawab kepada Allah Swt di akhirat. Seorang pemimpin akan dianggap lolos dari tanggung jawab formal dihadapan orang-orang yang dipimpinnya, tetapi belum tentu lolos ketika ia bertanggungjawab dihadapan Allah Swt. Kepemimpinan sebenarnya bukan sesuatu yang mesti menyenangkan, tetapi merupakan tanggung jawab sekaligus amanah yang harus diemban dengan sebaik-baiknya. Allah Swt berfirman: Q.S al-Mu'minun ayat 8

وَالَّذِيْنَ هُمْ لِاَمٰنٰتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُوْنَۙ

"Dan (sungguh beruntung) orang yang memelihara amanat-amanat dan janjinya"

Seorang pemimpin harus bersifat amanah, sebab ia akan diserahi tanggungjawab. Jika pemimpin tidak mempunyai sifat amanah, tentu yang terjadi adalah penyalahgunaan jabatan dan wewenang untuk hal-hal yang tidak baik.[26] Itulah mengapa nabi Muhammad SAW juga mengingatkan agar menjaga amanah kepemimpinan, sebab hal itu akan dipertanggungjawabkan, baik didunia maupun diakhirat. Nabi bersabda: "Setiap kalian adalah pemimpin, dan kalian akan

[26] Raihan Putri, *Kepemimpinan Perempuan Dalam Islam*,cet ke-1(Yogyakarta: AK Group, 2006), 52

dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya" (HR. Bukhori).[27] Nabi Muhammad SAW juga bersabda: "Apabila amanah disia-siakan maka tunggulah saat kehancuran". Waktu itu ada seorang shahabat bertanya apa indikasi menyia-nyiakan amanah itu wahai Rasulullah? Beliau menjawab: "Apabila suatu perkara diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya maka tunggulah saat kehancurannya" (HR. Bukhori)[28]

Kepemimpinan mestinya tidak dilihat sebagai fasilitas untuk menguasai, tetapi dimaknai sebagai sebuah pengorbanan dan amanah yang harus diemban dengan sebaik-baiknya. Kepemimpinan juga bukan kesewenang- wenangan untuk bertindak, tetapi kewenangan untuk melayani dan mengayomi dan berbuat dengan seadil-adilnya. Kepemimpinan adalah sebuah keteladanan dalam bertindak. Kepemimpinan semacam ini akan muncul jika dilandasi dengan semangat amanah, keikhlasan dan nilai-nilai keadilan.[29] Pemimpin yang ideal merupakan dambaan bagi setiap orang, sebab pemimpin itulah yang akan membawa maju-mundurnya suatu organisasi, lembaga, negara dan bangsa. Oleh karenanya, pemimpin mutlak dibutuhkan demi tercapainya kemaslahatan umat. Tidaklah mengherankan jika ada seorang pemimpin yang kurang ideal misalnya cacat mental dan fisik, maka cenderung akan mengundang kontroversi, apakah tetap akan dipertahankan atau di non aktifkan.[30]

---

[27] Muslich Shabir, *Terjemah Riyadhus Shalihin*, jilid 1, (Semarang: Karya Toha Putra, 2004), 335.

[28] Raihan Putri, *Kepemimpinan Perempuan*., 57

[29] Abdul Al-Rahman Ibnu Khaldun, *Muqaddimat* (t.t.t: Maktabah Al-Tijariyah Al-Kubs, t.t). 191

[30] Ernita Dewi, *Menggagas Kriteria Pemimpin.*, 14

Imam Al-Mawardi dalam *Al-Ahkam al-Sulthaniyah* menyinggung mengenai hukum dan tujuan menegakkan kepemimpinan. Dia mengatakan bahwa menegakkan kepemimpinan dalam pandangan Islam adalah sebuah keharusan dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara. Lebih lanjut, beliau mengatakan bahwa keberadaan pemimpin (Imamah) sangat penting, karena imamah mempunyai dua tujuan: pertama: *Likhilafati an- Nubuwwah fi-Harosati ad-Din*, yakni sebagai pengganti misi kenabian untuk menjaga agama. Dan kedua: *Wa sissati ad-Dunnya*, untuk memimpin atau mengatur urusan dunia. Dengan kata lain bahwa tujuan suatu kepemimpinan adalah untuk menciptakan rasa aman, keadilan, kemaslahatan, menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, mengayomi rakyat, mengatur dan menyelesaikan problem-problem yang dihadapi masyarakat.[31]

D. Kriteria Pemimpin Ideal dalam Islam

Dalam konsep Syari'at Islam kriteria yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin telah dirumuskan dalam suatu cakupan sebagai berikut:

a) Pemimpin haruslah orang-orang yang amanah, amanah dimaksud berkaitan dengan banyak hal, salah satu di antaranya berlaku adil. Keadilan yang dituntut ini bukan hanya terhadap kelompok, golongan atau kaum muslimin saja, tetapi mencakup seluruh manusia bahkan seluruh makhluk. Dalam al-Qur'an surah an-Nisa': 58 dijelaskan:

اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمٰنٰتِ اِلٰٓى اَهْلِهَاۙ وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِۗ

[31] Al-Mawardi, *Al-Ahkam Al-Sulthaniyah* (Bairut: Dar Al-Fikr, 1980), 6

اِنَّ اللّٰهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِه اِنَّ اللّٰهَ كَانَ سَمِيْعًاۢ بَصِيْرًا

"Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat"

Ayat di atas memerintahkan menunaikan amanat, ditekankannya bahwa amanat tersebut harus ditunaikan kepada ahliha yakni pemiliknya. Ketika memerintahkan menetapkan hukum dengan adil, dinyatakannya "Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia".Ini bearti bahwa perintah berlaku adil itu ditunjukkan terhadap manusia secara keseluruhan.[32]

b) Seorang pemimpin haruslah orang-orang yang berilmu, berakal sehat, memiliki kecerdasan, kearifan, kemampuan fisik dan mental untuk dapat mengendalikan roda kepemimpinan dan memikul tanggungjawab. Sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an surah an-Nisa': 83

وَاِذَا جَآءَهُمْ اَمْرٌ مِّنَ الْاَمْنِ اَوِ الْخَوْفِ اَذَاعُوْا بِهٖۗ وَلَوْ رَدُّوْهُ اِلَى الرَّسُوْلِ وَاِلٰٓى اُولِى الْاَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِيْنَ يَسْتَنْۢبِطُوْنَهٗ مِنْهُمْۗ وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهٗ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطٰنَ اِلَّا قَلِيْلًا

"Dan apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka lalu menyiarkannya. Dan kalau mereka menyerahkannya kepada Rasul dan Ulil Amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya (akan dapat) mengetahuinya dari mereka (Rasul dan Ulil Amri). Kalau tidaklah karena karunia dan rahmat Allah kepada kamu, tentulah kamu mengikut syaitan, kecuali sebahagian kecil saja (di antaramu)".

Maksud ayat di atas adalah kalau mereka menyerahkan informasi tentang keamanan atau ketakutan itu kepada Rasulullah Saw apabila bersama mereka, atau

[32] M.Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah Pesan, Kesan, dan keserasian al-Qur'an*, Cet ke-1 (Ciputat: Lentera Hati, 2000), 458

kepada pemimpin-pemimpin mereka yang beriman, niscaya akan diketahui hakikatnya oleh orang-orang yang mampu menganalisis hakikat itu dan nggalinya dari celah-celah informasi yang saling bertentangan dan tumpang tindih.[33]

c) Pemimpin harus orang-orang yang beriman, bertaqwa dan beramal shaleh, tidak boleh orang dzalim, fasiq, berbuat keji, lalai akan perintah Allah Swt dan melanggar batas-batasnya. Pemimpin yang dzalim, batal atau tidak sah kepemimpinannya.[34]

d) Bertanggung jawab dalam pelaksanaan tatanan kepemimpinan sesuai dengan yang dimandatkan kepadanya dan sesuai keahliannya. Sebaliknya Negara dan rakyat akan hancur bila dipimpin oleh orang yang bukan ahlinya. Sebagaimana sabda Rasulullah Saw *"Apabila diserahkan suatu urusan kepada yang bukan ahlinya maka tungguhlah kehancuran suatu saat"* (HR. Al-Bukhari)

e) Senantiasa menggunakan hukum yang telah ditetapkan Allah, seperti yang Allah jelaskan dalam al-Qur'an an-Nisa ayat 59:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْۚ فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَأْوِيْلًا

"Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya"

---

[33] Sayyid Quthb, *Tafsir fi Zhilalil Qur'an, (terj), As'ad Yasin*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 54

[34] Raihan Putry, "Kepemimpinan Perempuan Dalam Persfektif Islam", *Jurnal Mudarissuna*, 4, no. 2 (Desember 2015), 9

Ayat di atas merupakan perintah untuk taat kepada Allah, Rasul, dan *Ulil Amri* (ulama dan umara). Oleh karena Allah berfirman "Taatlah kepada Allah", yakni ikutilah kitab-nya, "dan taatlah kepada Rasul", yakni pegang teguhlah sunnahnya, "dan kepada *Ulil Amri* di antara kamu", yakni terhadap ketaatan yang mereka perintahkan kepadamu, berupa ketaatan kepada Allah bukan ketaatan kepada kemaksiatan terhadapnya kemudian apabila kamu berselisih tentang suatu hal maka kembalilah kepada al-Qur'an dan hadits.[35]

f) Tidak meminta jabatan, atau menginginkan jabatan tertentu, sabda Rasulullah Saw *"Sesungguhnya kami tidak akan memberikan jabatan ini kepada seseorang yang memintanya, tidak pula kepada orang yang berambisi untuk mendapatkannya."* (H.R . Muslim).

E. Prinsip-prinsip Kepemimpinan dalam Islam

a. Prinsip Tauhid

Prinsip tauhid merupakan salah satu prinsip dasar dalam kepemimpinan Islam sebab perbedaan akidah yang fundamental dapat menjadi pemicu dan pemacu kekacauan suatu umat. Oleh sebab itu, Islam mengajak kearah satu kesatuan akidah diatas dasar yang dapat diterima oleh semua lapisan masyarakat, yaitu tauhid. Dalam al-Qur'an sendiri dapat ditemukan dalam surat an-Nisa' 48, Ali Imran 64 dan surat al Ikhlas.[36]

---

[35] Ibnu Katsir, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir, (terj), M. Nasib Ar-Rifa'i,* (Jakarta: Gema Insani, 1999), 740-741

[36] Shalahuddin Al Syaifullah, Putri Anggun Bhakti Insanitaqwa, Mufidah Sofyan, "Kepemimpinan Pendidikan Islam", *Jurnal ilmiah Indonesia,* 1, no. 7 (Juli 2021), 4

b. Prinsip Musyawarah (*Syuro*)

Musyawarah berarti mempunyai makna mengeluarkan atau mengajukan pendapat dalam menetapkan keputusan yang berkaitan dengan kehidupan berorganisasi dan bermasyarakat musyawarah dalam konteks membicarakan persoalan-persoalan tertentu dengan anggota masyarakat, termasuk didalamnya dalam hal berorganisasi. Hal ini sebagaimana terdapat pada surat Ali- Imran ayat 158:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللهِ لِنْتَ لَهُمْ ۚ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوْا مِنْ حَوْلِكَ ۖ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِى الْاَمْرِ ۚ فَاِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ ۗ اِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِيْنَ

"Maka berkat rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh, Allah mencintai orang yang bertawakal".

Meskipun terdapat beberapa Al-qur'an dan as-Sunnah yang menerangkan tentang musyawarah. Hal ini bukan berarti al-Qur'an telah menggambarkan sistem pemerintahan secara tegas dan rinci, nampaknya hal ini memang disengaja oleh Allah untuk memberikan kebebasan sekaligus medan kreatifitas berfikir hambanya untuk berijtihad menemukan sistem pemerintahan yang sesuai dengan kondisi sosial-kultural. Sangat mungkin ini salah satu sikap demokratis Tuhan terhadap hamba-hambanya

c. Prinsip Adil (*al-'adalah)*

Pemimpin sepatutnya mampu memperlakukan semua orang secara adil, tidak berat sebelah dan tidak memihak, dalam konteks organisasi keadilan seorang

pemimpin menjadi faktor yang menentukan kinerja dan motivasi seorang bawahan. Keadilan sendiri pada dasarnya memiliki dua makna yang sering dikemukakan oleh para ulama. Pertama adil dalam arti sama, artinya tidak membeda-bedakan satu sama lain, persamaan yang dimaksud adalah persamaan hak. Hal ini dilakukan untuk memutuskan suatu perkara atau hukum. Kedua adil dalam arti seimbang, keadilan identic dengan kesesuaian sementara itu kesesuaian dan keseimbangan tidak mengharuskan adanya persamaan kadar yang besar dan kecilnya ditentukan oleh fungsi yang diharapkan darinya.[37]

d. Prinsip Kebebasan (*al-Hurriyah*)

Pemimpin yang baik adalah mereka yang mampu memberikan ruang dan mengundang anggota kelompok untuk mampu mengemukakan kritiknya secara konstruktif, mereka diberikan kebebasan untutk mengeluarkan pendapatnya serta harus mampu memberikan jawaban atas setiap masalah yang mereka ajukan. Agar suskes dalam memimpin seorang pemimpin hendaknya dapat menciptakan suasana kebebasan berfikir dan pertukaran gagasan yang sehat dan bebas, saling kritik dan saling menasehati satu sama lain, sehingga para pengikutnya merasa senang dalam mendiskusikan masalah atau persoalan yang menjadi kepentingan bersama. Pemimpin yang selalu berlapang dada dalam menerima semua kritikan dari bawahan sehingga lebih mudah memperbaiki kualitas kepemimpinannya di masa yang akan datang.[38]

---

[37] Hanif Ferryanto, Implementasi Kepemimpinan Islam dalam Proses Inovasi Produk, Jurnal Ekonomi Syariah, Vol. 2, No. 3 (Maret 2015), 7

[38] *Ibid.,* 8

BAB III

KONSEP MASYARAKAT MULTIKULTURAL

A. Pengertian Masyarakat Multikultural

1. Definisi Multikultural

Multikulruralisme berasal dari dua kata yaitu, multi yang berarti banyak atau beragam dan kulruralisme yang berarti budaya. Jadi multikulturalisme merupakan pengakuan atas realitas keragaman kultural yang meliputi keberagaman tradisional maupun bentuk-bentuk sosial kehidupan seperti suku, ras, keyakinan agama, dan adat istiadat yang terus timbul dalam sejarah kehidupan manusia. Secara mendalam multikulturalisme mengandung makna pengakuan terhadap kesejahteraan manusia yang hidup dalam suatu lingkungan dengan kebudayaan yang berbeda-beda dan unik.[1]

Multikulrurlisme adalah sebuah ideologi tentang keragaman budaya yang memunculkan pemahaman-pemahaman tentang toleransi, keadilan, kesetaraan, dan kebersamaan. Multikulturalisme merupakan sebuah konsep yang akan mampu menjawab tentang tantangan perubahan zaman dan menjadi sebuah ideologi yang mengagungkan perbedaan yang mendorong terwujudnya toleransi budaya sebagai suatu ciri kehidupan. Multikulturalisme merupakan sebuah gerakan sosio-intelektual yang mengiklankan nilai dan prinsip perbedaan serta pentingnya penghargaan pada setiap kelompok yang memiliki budaya berbeda.[2]

Berdasarkan pemaparan di atas dengan adanya multikulturalisme yang mengakui dan menghormati keanekaragaman budaya maka hal ini membawa

[1] Choirul Mahdud, *Pendidikan Multikultural* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009), 75
[2] Zubaedi, *Pendidikan berbasis masyaraka* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2006), 6

dampak dalam bersikap bahwa realitas sosial yang majemuk tidaklah menjadi sebuah kendala untuk membangun hubungan sosial manusia yang penuh toleransi dan bahkan dapat hidup berdampingan secara damai, serta sikap menerima realitas dalam keberagaman.

2. Pengertian Masyarakat

Istilah masyarakat sudah tidak asing lagi terdengar oleh kita dalam setiap daerah memiliki kelompok masyarakat masing-masing dan menganut sebuah budaya yang dibangun oleh masyarakat itu sendiri sebagai acuan nilai, norma, identitas bagi individu-individu yang tergabung dalam sebuah kelompok masyarakat.

Masyarakat merupakan sehimpunan orang yang hidup bersama dalam suatu tempat dengan ikatan-ikatan aturan yang tertentu.[3] Adapun masyarakat menurut Kamus sosiologi adalah kelompok orang-orang tertentu yang menduduki wilayah geografis tertentu, memiliki kebudayaan yang sama dan mampu bertindak secara kolektif untuk mencapai sesuatu.[4] Sedangkan masyarakat menurut ilmu sosiologi adalah sekelompok manusia yang bertempat tinggal di daerah tertentu dalam waktu yang relatif lama, memiliki norma-norma yang mengatur kehidupannya menuju tujuan yang ditentukan bersama.[5]

Menurut Soerjono Soekanto bahwa ciri-ciri masyarakat adalah sebagai berikut:[6]

---

[3] W.J.S Purwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), 751

[4] Kartasapoetra, Hartini, *Kamus Sosiologi dan Kependudukan* (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), 64

[5] Elly M. Setiandi, Usman Kholid, *Pengantar Sosiologi* (Jakarta: Kencana, 2011), 44

[6] Soerjono Soekanto, *Sosiologi suatu pengantar* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 22

1) Masyarakat merupakan sekumpulan manusia yang hidup bersama, tingkatan hidup bersama ini bisa dimulai dari dua kelompok.
2) Hidup bersama untuk waktu yang cukup lama, dalam hidup bersama ini akan terjadi interaksi antara manusia-manusia yang ada dalam kelompok masyarakat. Interaksi ini akan berlangsung secara terus menerus tanpa henti dan akan melahirkan sistem interaksi yang akan tampak dalam peraturan-peraturan yang akan mengatur hubungan antar manusia.
3) Mereka sadar bahwa mereka merupakan satu kesatuan yang saling melengkapi yang saling membutuhkan satu dengan yang lainnya.
4) Mereka merupakan satu sistem hidup bersama, sistem kehidupan bersama menimbulkan kebudayaan karena setiap anggota kelompok merasa dirinya terkait satu dengan lainnya.

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa salah satu ciri khas masyarakat adalah sekelompok manusia yang tinggal secara bersama-sama dan memiliki hubungan sosial antara satu dengan yang lain dan tinggal dalam sebuah daerah yang sama.

3. Pengertian Masyarakat Multikultural

Masyarakat multikultural merupakan sekelompok manusia yang tinggal dan hidup menetap di suatu tempat yang memiliki kebudayaan dan ciri khas tersendiri yang mampu membedakan antara satu masyarakat dengan masyarakat yang lain. Masyarakat multikultural adalah suatu masyarakat bersifat majemuk sejauh masyarakat tersebut secara struktur memiliki sub-sub kebudayaan yang bersifat *"Deserve*" yang ditandai oleh kurang berkembangnya sistem nilai yang disepakati

oleh seluruh anggota masyarkat dan juga sistem nilai yang disepakati oleh seluruh anggota masyarakat dan juga sistem nilai dari kesatuan-kesatuan sosial, seta seingnya muncul konflik-konflik sosial.[7]

Menurut C.W Watson dalam bukunya *Multiculturalism* membicarakan masyarakat multikultural adalah membicarakan masyrakat Negara, bangsa, daerah,bahkan kondisi geografis yang terdiri atas orang-orang yang memiliki kebudayaan yang berbeda-beda.[8] Sedangkan menurut H.A.R Tilar juga mendefinisikan lebih lanjut mengenai multikulturalisme yng berarti institusionalisasi dari keanekaragaman kebudayaan yang dimiliki oleh kelompok-kelompok etnis di dalam suatu nation-state melalui bidang-bidang atau sistem hukum, pendidikan, kebijakan pemerintah dalam kesehatan dan perumahan, bahasa, praktik-praktik keagamaan dan dalam bidang lainnya.[9]

Pada dasarnya masyrakat multikultural yaitu masyarakat yang terdiri dari berbagai suku yang saling memiliki struktur budaya yang berbeda, dalam hal ini masyarakat multikultural bersifat heterogen yang kehidupan individunya di masyarakat multikultural bersifat toleransi yang harus saling menerima serta hidup berdampingan dengan damai satu sama lain dengan perbedaan yang ada pada tiap etnis sosial maupun politiknya.[10]

---

[7] Saddam, Ilmiawan Mubin, "Perbandingan Sistem Sosial Budaya Indonesia dari Masyarakat Majemuk ke Masyarakat Multikultural", *Jurnal Kajian,Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Sejarah*, 5, no. 2, 141

[8] Ifa Nur Hayati "Masyarakat Multikultural (pengertian, ciri, dan faktor pembentuknya", *Akademika* 14, no. 1 (Juni, 2021), 19

[9] H.A.R Tilar, *Multikulturalisme Tantangan-Tantangan Global Masa Depan Dalam Transformasi Pendidikan Nasional* (Jakarta: PT Grasindo, 2004), 387

[10] Ifa Nur Hayati "Masyarakat Multikultural"., 20

B. Macam-macam masyarakat multikultural

a. multikulturalisme Isolasionis

Mengacu visi pada masyarakat sebagai tempat bagi berbagai kelompok kultural yang berbeda, menjalani hidup secara otonom dan terlibat dalam saling interaksi.[11]

b. Multikulturalisme Akomodatif

Mengacu pada visi masyarakat yang memiliki kultur dominan yang membuat penyesuaian dan akomodasi-akomodasi tertentu bagi kebutuhan kultur kaum minoritas. Masyarakat ini merumuskan undang-undang, hukum dan ketentuan-ketentuan yang sensitif secara kultural, dan memberikan kebebasan kepada kaum minoritas untuk mempertahankan dan mengembangkan kebudayaan mereka.

c. Multikulturalisme Otonomis

Masyarakat plural di mana kelompok- kelompok kultural utama berusaha mencapai kesetaraan dengan budaya dominan dan menginginkan kehidupan otonom dalam kerangka politik yang secara kolektif bisa diterima. Perhatian pokok kultural ini adalah untuk mempertahankan cara hidup mereka yang memiliki hak yang sama dengan kelompok dominan dan berusaha menciptakan suatu masyarakat di mana semua kelompok bisa eksis sebagai mitra sejajar.[12]

---

[11] Purjatian Azhar, "Kesetaraan dalam Masyarakat Multikultural", *Jurnal Asketik: Agama dan perubahan sosial*, 4, No. 2 (Desember 2020), 3

[12] *Ibid.,* 4

d. Multikulturalisme Kritikal atau Interaktif

Masyarakat plural di mana kelompok-kelompok kurang peduli dengan kehidupan kultural otonom, tetapi sebaliknya membutuhkan penciptaan budaya kolektif yang mencerminkan dan menegaskan pandangan mereka yang berbeda.. Multikultural ini, berlaku di Amerika Serikat dan Inggris perjuangan kulit hitam dalam menuntut kemerdekaan.

f. Multikulturalisme Kosmopolitan

Paham yang berusaha menghapuskan batas-batas kultural sama sekali untuk menciptakan sebuah masyarakat di mana setiap individu tidak lagi terikat pada budaya tertentu. Sebaliknya, mereka secara bebas mengalami budaya dan sekaligus mengembangkan kehidupan budayanya masing-masing.[13]

C. Bentuk dan ciri-ciri Masyarakat Multikultural

1. Bentuk Masyarakat Multikultural

a. Interseksi

Interseksi merupakan suatu titik potong atau pertemuan. Dalam sosiologi, interseksi dikenal sebagai suatu golongan etnik yang majemuk. Dalam Sosiologi, interseksi adalah persilangan atau pertemuan keanggotaan suatu kelompok sosial dari berbagai seksi. Baik berupa suku, agama, jenis kelamin, kelas sosial, dan lain-lain dalam suatu masyarakat majemuk. Suatu interseksi terbentuk melalui interaksi sosial atau pergaulan yang intensif dari anggota-anggotanya melalui sarana pergaulan dalam kebudayaan manusia, antara lain bahasa, kesenian, sarana

[13] Siti Rohmaniah," Peran Agama Dalam Masyarakat Multikultural," *"*Jurnal Ri'Ayah.3, no. 1 (Maret 2018), 6

transportasi, pasar, sekolah. Dalam memanfaatkan sarana-sarana interseksi sosial itu, anggota masyarakat dari latar belakang ras, agama, suku, jenis kelamin, tingkat ekonomi, pendidikan, atau keturunan berbeda-beda dapat bersama-sama menjadi anggota suatu kelompok sosial tertentu atau menjadi penganut agama tertentu. Jadi, yang dimaksud dengan interseksi adalah suatu masyarakat yang terdiri dari banyak suku,budaya,agama, dan lain-lain yang berbaur menjadi satu kesatuan di dalam komunitas tertentu.[14]

b. Konsolidasi

Konsolidasi merupakan suatu proses penguatan pemikiran atas kepercayaan yang telah diyakini agar kepercayaan akan sesuatu yang diyakini semakin kuat. Yang mana hal ini dilakukan oleh orang yang lebih mengerti akan kepercayaan yang dianut. Konsolidasi menjadi suatu proses penguatan yang dilakukan untuk memberikan tambahankeimanan atas apa yang telah seseorang yakini, yang biasanya dilakukan oleh orang yang sudah mencapai tingkatan tertenatu. Jadi, yang dimaksud dengan konsolidasi adalah suatu penguatan atas apa yang telah melekat pada dirinya.[15]

c. Primordialisme

Primordialisme adalah sebuah pandangan atau paham yang memegang teguh hal-hal yang dibawa sejak kecil, baik mengenai tradisi, adat-istiadat, kepercayaan, maupun segala sesuatu yang ada di dalam lingkungan pertamanya. Primordialisme berasal dari kata bahasa latin primus yang artinya pertama dan

[14] Ivan Hadar, " Msyarakat Multikulturalisme", Kompas, 26 September 2023
[15] *Ibid.,*

ordiri yang artinya tenunan atau ikatan. Ikatan seseorang pada kelompok yang pertama dengan segala nilai yang diperolehnya melalui sosialisasi akan berperan dalam membentuk sikap primordial,di satu sisi, sikap primordial memiliki fungsi untuk melestarikan budaya kelompoknya, namun di sisi lain sikap ini dapat membuat individu atau kelompok memiliki sikap etnosentrisme, yaitu suatu sikap yang cenderung bersifat subyektif dalam memandang budaya orang lain.

Mereka akan selalu memandang budaya orang lain dari kacamata budayanya. Hal ini terjadi karena nilai-nilai yang telah tersosialisasi sejak kecil sudah menjadi nilai yang mendarah daging (internalized value) dan sangatlah susah untuk berubah dan cenderung dipertahankan bila nilai itu sangat menguntungkan bagi dirinya. suatu primordialisme adalah suatu kepercayaan yang sudah mendarah daging, maka setiap orang yang memiliki primordial pasti dia akan sulit menerima paham lain selain paham yang telah mendarah daging dalam dirinya.[16]

2. ciri-ciri dari masyarakat multikultural

Menurut Hikmat Budiman dalam bukunya setidaknya ada delapan ciri-ciri masyarakat multikultural sebagai berikut:

a) Masyarakat yang di dalamnya memiliki banyak keberagaman
b) Segmentasi atau masyarakat yang terbentuk dari bermacam-macam ras, suku, budaya
c) Memiliki struktur yang ada di dalam lembaga non komplementer
d) Konsensunya rendah

[16] *Ibid.,*

e) Relatif potensi adanya konflik,

f) Integrasi bisa tumbuh dengan adanya paksaan

g) Adaanya dominasi politik kepada kelompok lainnya

h) Timbulnya kelompok minoritas dan mayoritas karena keberagaman.[17]

Dari beberapa ciri-ciri di atas dapat disimpulkan bahwa masyarakat multikultural adalah masyarakat yang terbentuk dari bermacam-macam suku, ras, agama dan keanekaragaman lainnya sehingga masih memiliki pemisah yang kuat antar kelompok masyarakat. Adanya dominasi dari satu kelompok ke kelompok masyarakat lainnya, kelompok dalam masyarakat multikultural biasanya terbagi menjadi pihak yang mendominasi dan pihak yang terdominasi. Banyaknya perbedaan dalam lingkungan masyarakat multikultural, maka sulit untuk tercapainya suatu kesepakatan yang disetujui kelompok masyarakat oleh karena itu sulit membuat keputusan sehingga consensus yang terbentuk rendah. Integrasi sosial pada masyarakat multikultural biasanya dipaksakan karena banyaknya keberaragaman yang ada dan juga membuat timbulnya kelompok mayoritas dan minoritas karena keberagaman tersebut.

[17] Hikmat Budiman, *Hak Minoritas: Dilema Multikulturalisme di Indonesia* (Jakarta: Yayasan Interseksi, 2007), 71

BAB IV

KEMIMPINAN WALI NAGARI PADA MASYARAKAT MULTIKULTURAL DALAM PERSFEKTIF *FIQH SIYASAH*

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Nagari merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat hukum. Nagari perlu untuk selalu memikirkan bagaimana kondisi nagarinya dimasa yang akan datang, sehingga nagari tersebut bertambah maju.

Nagari Tanjung Betung Timur berada di Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman Propinsi Sumatra Barat. luas nagari : 20,12 Kilometer persegi, Jarak dari kantor wali nagari ke Ibu Kota Kecamatan adalah 8 kilometer, ke Ibu Kota Kabupaten 47 kilometer, ke Ibu Kota Propinsi adalah 221 kilometer.[1] Nagari Tanjung Betung Timur merupakan nagari baru di Kecamatan Rao Selatan karena ada pemekaran wilayah, ide pemekaran wilayah di Nagari Tanjung Betung Timur yaitu pada tahun 2017, dan resmi menjadi Nagari Tanjung Betung Timur pada 26 Desember 2019. Nagari Tanjung Betung Timur terdiri dari 3 Kejorongan yaitu;

1. Jorong Rambahan
2. Jorong Rambahan Selatan
3. Jorong Kampung Tujuh

Adapun batas-batas wilayah Nagari Tanjung Betung Timur sebagai berikut

Sebelah Utara : Nagari Langsek Kodok

[1] Arsip Nagari Tanjung Betung Timur 2022

Sebelah Selatan : Nagari Padang Gelugur

Sebelah Barat : Nagari Tanjung Betung

Sebelah Timur : Nagari Silayang

Nagari Tanjung Betung Timur memilki ketinggian di atas permukaan laut 230-300 M DPL, suhu udara rata-rata 24-32 c. Topografi Nagari Tanjung Betung Timur adalah dataran rendah, dan perbukitan, dan memeiliki curah hujan 2000-3000 mm / tahun.[2] Nagari Tanjung Betung Timur dilalui dua sungai yaitu sungai Sibnail dan Sungai Batang asik yang membujur dari utara ke selatan. Sebagian masyarakat masih menggunakan sungai tersebut untuk mandi mencuci di samping untuk irigasi. Kondisi lingkungan Nagari Tanjung Betung Timur secara umum telah mencirikan kawasan yang berkarakter daerah permukiman namun masih memberikan kesan daerah yang teduh dan alami. nagari Tanjung Betung Timur dengan bentang alam yang cukup datar memberikan suatu karakter sendiri, sehingga secara langsung akan mempengaruhi pola tata ruangan.

1. Kependudukan

Jumlah penduduk di Nagari Tanjung Betung Timur pada bulan Januari tahun 2023 berjumlah 3501 jiwa, dengan jumlah penduduk laki-laki 1768 dan jumlah penduduk perempuan 1733 lebih jelasnya dapat dilihat seperti tabel di bawah ini.

[2] Arsip Nagari Tanjung Betung Timur 2022

Tabel 1

Jumlah Penduduk Nagari Tanjung Betung Timur

NO	**Indikator**	**Jumlah penduduk Tahun 2022**
1	Jumlah penduduk laki-laki	1768
2	Jumlah penduduk Perempuan	1733

Dari tabel di atas dapat kita lihat bahwa jumlah penduduk menurut jenis kelamin laki-laki dan perempuan nagari Tanjung Betung Timur ke duanya hampir sama banyak dan seimbang. Masyarakat nagari Tanjung Betung Timur dikenal dengan masyarakat multikultural yaitu masyarakat yang terdiri dari berbagai jenis etnis, mulai dari Minangkabau, Mandailing, Jawa seperti tabel di bawah ini.

Tabel 2

Etnis yang terdapat dalam Nagari Tanjung Betung Timur

No	Etnis	Jumlah
1	Minang	1.876
2	Mandailing	1.366
3	Jawa	253

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah penduduk etnis minang lebih banyak penduduknya dari pada etnis mandailing dan etnis jawa.

2. Iklim Daerah

Nagari Tanjung Betung Timur ini mempunyai iklim yang sejuk. Pada siang hari ini, matahari tidak terlalu panas namun di malam hari cuaca belakangan dingin dan kadang biasa saja. Pada bulan September, Oktober, November dan Desember biasanya terjadi musim hujan. Pada bulan-bulan tersebut kebanyakan petani turun ke sawah dan ke kebun untuk mengolah lahan pertaniannya. Sementara musim kemarau biasanya terjadi pada awal tahun.

3. Pendidikan

Pendidikan merupakan suatu usaha yang dilakukan secara sadar untuk mengambil ilmu pengetahuan, sekaligus untuk mengangkat harkat dan martabat seseorang pada derajat yang lebuh tinggi dan pada hakikatnya pendidikan juga dapat mengembangkan kepribadian dengan kemampuan di dalam dan diluar sekolah yang berlangsung seumur hdup, dan dilaksanakan dalam lingkungan keluarga, masyarakat,pemerintah.

Pendidikan telah menjadi suatu kebutuhan pokok oleh manusia terutama sekali bagi mereka yang berada pada usia sekolah. Pendidikan yang baik tidak terlepas dari peran pemerintah dan masyarakat yang sama-sama bekerja dalam usaha meningkatkan mutu pendidikan. Pendidikan sangat diperlukan bagi kemajuan masyarakat suatu daerah baik yang menyangkut dengan pendidikan formal maupun pendidikan non formal. Lancarnya pendidikan tersebut tentu harus ditunjang oleh sarana pendidikan yang memadai, untuk itu di bawah ini dijelaskan tingkat pendidikan yang ada di Nagari Tanjung Betung Timur.

Tabel 3

Tingkat Pendidikan Penduduk Nagari Tanjung Betung Timur

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (jiwa)
1	Tidak/belum sekolah	436
2	Tidak tamat SD/sederajat	363
3	Tamat SD/sederajat	778
4	Tamat SLTP/sederajat	905
5	Tamat SLTA/sederajat	536
6	Diploma I/II	30
7	Akademi/Diploma III/S.Muda	157
8	Diploma IV/Strata I	290
9	Strata II	5
10	Strata III	1

Berdasarkan tabel di atas tingkat pendidikan di Nagari Tanjung Betung Timur ini masih rendah jika dilihat masih banyak yang tidak pernah merasakan pendidikan, yaitu 436 jiwa dan masih banyak juga yang putus pendidikan di tengah jalan, TK nya berjumlah 149 jiwa, tamat SD berjumlah 429 jiwa, tamat SMP 905 jiwa, tamat SMA berjumlah 311 jiwa dan mahasiswa perguruan tinggi berjumlah 124 jiwa

4. Kondisi Sosial

Secara umum kehidupan masyarakat Nagari Tanjung Betung Timur

berpegang teguh pada agama dan adat istiadat, dengan demikian segala tata kehidupan masyarakat masih dipengaruhi oleh agama dan adat istiadat. Selanjutnya pengambilan keputusan selalu dilakukan dengan musyawarah mufakat. Adanya pembangunan dan perubahan arus informasi akan dapat menciptakan dinamika perubahan di Nagari Tanjung Betung Timur. Kondisi tersebut mengakibatkan tumbuh dan berkembangnya arus pergerakan dan mobilitas penduduk pada kawasan ini, sehingga melahirkan asimilasi pola sosial budaya yang beragam dalam lingkungan budaya Minangkabau, sosial, budaya adat Minangkabau bersifat fleksibel dan terbuka terhadap program-program pembangunan asalkan tidak bertentangan dengan kaidah agama dan norma-norma agama.

5. Ekonomi Masyarakat

Mata pencarian hidup merupakan sarana mutlak bagi masyarakat untuk mendapatkan sesuatu yang diperlukan guna untuk memenuhi kebutuhan ekonomi hidupnya. Ekonomi secara umum merupakan faktor yang sangat penting, sebab faktor tersebut sangat menyangkut potensi dasar yang dikelola untuk menjalankan usaha agar mencapai kesejahteraan rakyat dalam kehidupannya. Kehidupan ekonomi masyarakat Nagari Tanjung Betung Timur secara umum bersumber dari sawah dan ladang, sebagian kecil ada juga masyarakat Nagari Tanjung Betung Timur bekerja disektor lain.

6. Agama dan Adat Istiadat

Agama adalah suatu kepercayaan dan keyakinan yang dimiliki oleh seseorang. Agama merupakan suatu pedoman dalam menjalani aktivitas sehari-

hari, seseorang yang telah menyakini tentang kebenaran agama yang dianutnya, maka orang tersebut tidak akan goyah dalam mengahadapi segala persoalan, dan rintangan yang dihadapinya dalam menjalankan hidup. Agama merupakan suatu ikatan yang harus dipegang dan dipatuhi oleh manusia, karena ikatan tersebut mempuyai pengaruh yang besar terhadap kehidupan manusia. Ikatan yang dimiliki oleh manusia berasal dari kekuatan yang lebih tinggi dari manusia, dan merupakan suatu kekuatan yang tidak bisa ditangkap oleh panca indra manusia.

Manusia hidup di dunia ini tidak hanya semata-mata untuk mendapatkan kebahagiaan dunia saja, akan tetapi manusia ingin juga mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Untuk mencapai hal yang diinginkan, maka manusia membutuhkan pedoman dan dasar untuk dijadikan pedoman dalam berbuat dan tingkah laku, sesuai dengan ketentuan yang telah digariskan di dalam Al-Qur'an dan Hadits. Agama merupakan suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia karena agamalah yang menjadi sebuah pedoman manusia dalam menjalankan kehidupan. Agama diibaratkan sebagai sandaran bagi manusia untuk mencapai tujuan dalam hidup hubungan manusia sangat erat dengan tuhannya.

Sarana dan prasarana untuk beribadah yang saat ini ada di nagari Tanjung Betung Timur apat dilihat pada table di bawah ini

Tabel 4

Sarana dan prasarana ibadah di Nagari Tanjung Betung Timur

No	Sarana	Jumlah
1	Masjid	8
2	Musholla	13

Struktur Organisasi Nagari Tanjung Betung Timur

Wali Nagari: Zulkandri

Sekretaris Nagari: Amal Harahap

Bamus: Sartoni

Kaur tata usaha umum: Muhammad Hanif

Kaur Keuangan: Rio Febrianto

Kasi Pemerintahan: Fitri

Kasi Kesejahteraan: Ismawati Rianti

B. Kepemimpinan Wali Nagari dalam Pelaksanaan Pembangunan di dalam Masyarakat Multikultural di Nagari Tanjung Betung Timur.

Nagari adalah suatu wilayah yang sejumlah orang atau penduduk yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan tugas pembangunan di kedesaan, untuk melaksanakan tugas pembanguan tersebut diperlukan seorang pemimpin yang dinamakan Wali nagari yang memiliki kemampuan sesuai fungsinya sebagai Wali nagari untuk melaksanakan pembangunan di nagarinnya.

Sehubungan dengan hal itu keberhasilan pelaksanaaan pembangunan di nagari dapat dilihat dari kemampuan Wali nagarinya dalam menjalankan tanggung jawab kepemimpinannya sebagai pelaksana pembangunan. Kemampuan wali nagari dalam membuat perencanaan pembangunan nagari harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat, pada penelitian ini di nagari Tanjung Betung Timur Kecamatan Rao selatan. Wali nagari dalam memnjalankan pembangunan seperti pembanguan jembatan yang menghubungkan suatu jorong dengan jorong yang

lain, membuat jalur transportasi area pertanian masyarakat, penyediaan saluran air bersih, dan jalan ke pemakaman masyarakat belum terealisasi dengan baik.

Nasaruddin salah satu masyarakat nagari Tanjung Betung Timur pelaksanaan pembangunan di lakukan oleh Wali nagari terlebih dahulu mengundang serta menjelaskan kepada masyarakat mengenai apa tujuan pelaksanaan pembanguan tersebut, kemudian wali nagari melibatkan kelompok masyarakat yang ada di jorong masing-masing untuk menyusun perencanaan dan melakukan musyawarah dengan tujuan untuk memperoleh saran, ide agar pelaksanaan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.[3]

Kemampuan Wali nagari dalam merencanakan pembagunan nagari harus terlebih dahulu dan melibatkan BAMUS (Badan musyawarah nagari) untuk meminta aspirasi dari masyarakat tentang pembangunan yang mana terlebih yang harus di prioritaskan dan yang sangat di butuhkan oleh masyarakat.

Sartoni selaku Ketua BAMUS mengatakan bahwa : saya merasa sudah menjalankan tanggung jawab dengan benar saya sudah meenyepakati rancangan pembanguan yang sudah di susun oleh Wali nagari dan saya sudah menyalurkan apa yang menjadi keluh kesah masyarakat. Tetapi Wali nagari memnag menjelaskan tentang tujuan dari pelaksanaan pembangunan kepada masyarakat melalui musyawarah nagari, namun wali nagari tidak membuat langkah-langkah yang perlu dibuat dalam pelaksanaan pembagunan, Wali nagari juga tidak transparansi dalam biaya pembanguan nagari, seharusnya Wali nagari membuat

[3] Nasaruddin, *wawancara pribadi*, Rambahan: 20 november 2023

langkah-langkah seperti dalam hal pengerjaan apa yang semestinya di prioritaskan, dalam pengadaan bahan, kapan bahan tersebut harus sampai di lokasi pembangunan kemudian peralatan apa yang perlu di sediakan, Wali nagari juga harus membangun secara merata di masing- masing jorong sehingga tidak tertumpu pada satu titik saja.[4]

Wawancara di atas menjelaskan kemimpinan kepala desa dalam menjalankan pembangunan hanya mampu menjalankan musyawarah dan menjelaskan tujuan pembangunan akan tetapi tidak menetukan langkah-langkah yang mesti dikerjakan masyarakat dan tidak melaksanakan pembangunan yang di prirotaskan masyarakat sehingga masyarakat kurang berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan. Maka dapat dipahami Wali nagari cukup mampu dalam merencanakan tetapi belum bisa trasparansi merealisasikan pembangunan Nagari. Wali nagari dan BAMUS merupakan pemimpin terdepan dalam menggerakkan dan mengarahkan masyarakakat untuk selalu bekerja sama dalam pelaksanaan pembangunan nagari.

Menurut Fajar Al- Faruq salah seorang masyarakat mengatakan bahwa sebelum melaksanakan pembangunan nagari Wali nagari selalu memberikan pengarahan tentang apa yang akan dikerjakan terutama kepada Staf Wali nagari dan kepala urusan pembangunan kemudian Staf Wali nagari diperintahkan

[4] Sartoni, *wawancara pribadi*, Rambahan: 20 november 2023

mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam setiap pembangunan nagari berupa sumbangan uang, tenaga dan pikiran.[5]

Untuk memotisivasi masyarakat dalam pembangunan pembangunan Wali nagari harus meberikan pengarahan kepada bawahan apa mestinya dikerjakan melalui Staf wali nantinya bisa mejelaskan dan mengajak masyarakat agar mau berpartisipasi dalam pembangunan.

Menurut Ramlan kepala jorong Kampung tujuh mengatakan bahwa Wali nagari tidak memimpin langsung dalam pelaksanaan pembangunan, hal ini tidak memberikan motivasi masyarakat dan semangat gotong royong terutama bagi masyarakat untuk selalu berkerja sama dengan Staf nagari dan kelompok masyarakat dalam proses pelaksanaan pembangunan yang telah di rencanakan sebelumnya.[6]

Seharusnya Wali nagari harus hadir di lokasi pembangunan dengan datang langsung ke lokasi maka dapat memberikan semangat dan motivasi kepada masyarakat bahkan bisa memonitor keadaan pelaksanan pembangunan. Maka dari wawancara di atas dapat di pahami bahwa Wali nagari tidak mampu menggerakkan Stafnya dan masyarakat untuk selalu bekerja sama dalam pembangunan nagari, wali nagari kurang bisa mengendalikan masyarakat dan mengajaknya untuk ikut berpertisipasi dalam pelaksanaan pembangunan.

[5] Fajar Al- Faruq, *wawancara pribadi*, Rambahan: 21 november 2023
[6] Ramlan, *wawancara pribadi*, Rambahan: 20 november 2023

Wali nagari dan BAMUS di tuntut harus mampu dalam mengambil keputusan dengan memberikan alternatif-alternatif bagi masyarakat dan kelompok-kelompok yang ada di nagari serta tegas dalam menjalankan keputusan itu.

Menurut Mujianto salah seorang masyarakat mengatakan bahwa keputusan yang di ambil Wali nagari dan Bamus dalam rangka pelaksanaan pembangunan nagari tidak berdasarkan pertimbangan-pertimbangan usulan dan saran dari masyarakat dalam musyawarah nagari keputusan yang di ambil di tetapkan oleh Wali nagari itu sendiri tampa sepengetahuan masyarakat. [7]

Kemampuan dalam mengambil keputusan merupakan kebijakan ynag harus di ambil oleh Wali nagari, keputusan dan kebijakan Wali nagari haruslah sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat nagari yang dihasilkan melalui musyawarah nagari sehingga keputusan yang diambil tidak bertentangan dengan kepentingan masyarakat dan masyarakat merasa aspirasi tersalurkan

Dari wawancara di atas dapat dipahami bahwa Wali nagari kurang mampu dalam mengambil keputusan dalam proses penyelenggaraan pembangunan dan Wali nagari kurang memiliki ketegasan dengan keputusan yang telah diambil sebelumnya.

Masyarakat nagari Tanjung Betung Timur merupakan masyarakat yang multikultural yang memiliki latar belakang budaya yang berbeda serta

[7] Mujianto, *wawancara pribadi*, Rambahan: 21 november 2023

menginginkan kebutuhan yang berbeda-beda untuk itu Wali nagari harus mampu memberikan layanan kepada masyarakat yang multikultural itu dengan mempelajari budaya masing-masing dan menjemput langsuang aspirasi atau usulan yang lebih di prioritaskan oleh masyarakat yang multikultural itu.

Masyarakat nagari Tanjung betunng timur menginginkan pemerataan pembangunan dengan adil tidak tertumpu pada satu titik saja sehingga masyarakat menikmati hasil dari pembangunan itu bukan hanya satu suku saja sehingga suku yang lain terabaikan seperti suku minang memperoleh hasil dari pembangunan namun suku mandailing yang minoritas kurang tersentuh dari hasil pembangunan itu

Zulkandri sebagai Wali nagari tanjung Betung Timur mengatakan bahwa ketersediaan dana nagari yang ada terkhusus dalam pembangunan fisik yang sangat terbatas sehingga untuk menyamaratakan pembangunan di masing-masing jorong sulit untuk di terapkan karena keterbatasan dana tersebut.[8]

Menurut Sakmar selaku kepala jorong rambahan mengatakan bahwa pembangunan lebih banyak di lakukan di pemukiman masyarakat orang minang.[9]

Menurut Abdul Simamora selaku masyarakat mengatakan bahwa saya sebagai tim suskes dan juga dari marga tapanuli yang mendukung wali nagari yang menjabat hari ini namun pembangunan yang ada di daerah saya masih

[8] Zulkandri, *Wawancara pribadi*, Rambahan: 21 November 2023
[9] Sakmar, *Wawancara pribadi*, Rambahan: 21 November 2023

sedikit dan pembangunan lain tertumpu pada pemukiman orang minang karena kebetulan Wali nagari adalah orang minang.[10]

Menurut Hamdani selaku warga mandailing mengatakan bahwa pembangunan di tempat tinggal saya sangatlah sedikit itu pun tidak sesuai dengan yang di prioritaskan masyarakat memalui musyawarah desa, masyarakat meminta pengadaan air bersih namun karena ketersediaan dana menurut Wali nagari maka di alihkan kejalan usaha tani masyarakat padahal masyarakat sangat membutuhkan saluran air bersih.[11]

Kemampuan Wali nagari dalam pemeratan pembangunan terhadap masyarakat nagari Tanjung Betung Timur yang multikultural belum terealisasi dengan baik karena ketersediaan dana yang ada dan usulan masyarakat tidak sesuai dengan pembangunan yang di lakukan.

Dari wawancara di atas dapat dipahami bahwa Wali nagari belum mampu menjalankan kepemimpinannya dalam menjalankan pembangunan di dalam masyarakat yang multikultutal, hal ini di tandai dengan pembangunan yang lebih baanyak dilakukan terhadap masyarakat minang saja sedangkan masyarakat mandailing belum tersentuh hasil pembanguan itu dan tidak sesuai dengan yang diharapkan dan diusulkan warganya. Wali nagari dituntut mampu dalam mengkoordinir penyelenggaraan pembangunan nagari, mengambil keputusan dengan memberikan alternatif terbaik bagi masyarakat dan kelompok yang ada di nagari serta tegas dalam keputusan itu

[10] Abdul Simamora, *Wawancara pribadi*, Rambahan Selatan: 20 November 2023
[11] Hamdani, *Wawancara pribadi*, Rambahan Selatan: 20 November 2023

Menurut Iwan selaku masyarakat, dia mengatakan: Dalam hal menkoordinir penyelenggaraan pembangunan Wali nagari terlebih dahulu membicarakannya dalam musyawarah nagari kemudian membentuk kelompok-kelompok unit kerja tetapi tidak menjelskan kepada kelompok tersebut tentang pekerjaan apa yang akan dikerjakan oleh masing-masing kelompok itu.[12]

Pelaksanaan pembangunan nagari akan berhasil apabila wali nagari dan masyarakat mengkoordinir penyelenggaraan pembangunan dan membentuk kelompok-kelompok pembagian tugas kepada staf nagari, tokoh masyarakat dan masyarakat nagari. Mengkoordinir penyelengaraan pembangunan nagari selalu bekerja sama dan bertanggung jawab antara Wali nagari dan masyarakat nagari.

Dari wawancara di atas dapat dipahami bahwa wali nagari sudah mampu dalam mengkoordinir dalam penyelenggaraan pembangunan dan wali nagari telah mampu membentuk kelompok-kelompok masyarakat tetapi setelah kelompok masyarakat itu terbentuk wali nagari tidak terlalu menekankan tentang pembagian tugas dari setiap kelompok-kelompok masyarakat itu, sehingga masyarakat tidak mengetahui tugas apa yang akan dikerjakannya.

Wali nagari dituntut untuk memiliki kemampuan dalam mengawasi aktivitas-aktifitas pembangunan nagari untuk itu wali nagari harus mampu mengawasi dan memonitoring aktivitas penyelenggaran pemmbangunan nagari dan apabila terjadi penyimpangan BAMUS harus segera menegur wali nagari

[12] Iwan, *Wawancara pribadi*, Rambahan: 21 November 2023

tersebut sehingga tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam kegiatan pembangunan di lokasi pembangunan tersebut.

Menurut Gunawan sebagai salah satu masyarakat jorong kampung tujuh, beliau mengatakan: Wali nagari dalam hal pengawasan kegiatan pelaksanaan pembangunan jarang memonitor kegiatan pelaksanaan pembangunan itu dan Wali nagari kurang tanggap atau teliti dengan penyimpangan yang terjadi di lokasi pembangunan dan tidak memberikan sanksi yang tegas terhadap masyarakat dan staf nagari yang melakukan penyimpangan itu.[13]

Hal ini Masyarakat dibenarkan oleh Yasmin Masyarakat jorong Muaro gondang mengatakan: Wali nagari kurang tanggap atau kurang peduli dengan adanya penyimpangan yang terjadi di lokasi pembangunan, penyimpangan yang terjadi di lokasi menurut sepengetahuan saya berupa pengurangan bahan material, pengurangan jam kerja, kurang disiplin dalam menjaga keselamatan kerja, akan tetapi Wali nagari tidak segera memperbaiki penyimpangan itu sehingga pembangunan tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan.[14]

Mengawasi aktivitas-aktivitas pembangunan nagari perlu di lakukan oleh Wali nagari karena disanalah sumber permasalahan pembangunan nagari terjadi karena sering terjadi penyimpangan-penyimpangan dan kecurangan seperti pengurangan bahan, pengurangan jam kerja atau mempercepat waktu istrahat dari waktu yang seharusnya, hal ini perlu dilakukan perbaikan dan tindakan serta

[13] Gunawan, *Wawancara pribadi*, Rambahan: 21 November 2023
[14] Yasmin, *Wawancara pribadi*, Rambahan: 20 November 2023

sanksi yang tegas dari Wali nagari agar proses penyelenggaraan pembangunan bisa berjalan sesuai tujuan yang ingin dicapai.

Dari hasil penelitian tersebut ternyata kepemimpinan Wali nagari sebagai pelaksana pembangunan di Nagari tanjung Betung Timur Kecammatan Rao Selatan belum optimal, Wali nagari hanya sebatas merencanakan tapi tidak merealisasikan dan Wali nagari kurang transparan dalam pelaksanaan pembangunan nagari serta kurang memprioritaskan pembangunan tersebut sesuai dengan usulan dari masyarakat.

C. Pandangan *Fiqh siyasah* terhadap kepemimpinan Wali nagari pada masyarakat multikultural di Nagari Tanjung Betung Timur

Wali nagari merupakan pimpinan dalam suatu insstansi sebagaimana kepemimpinan dalam islam dalam tinjuan *fiqh siyasah* diperintahkan untuk mentaati allah, rasul beserta ulil amri yaitu pimpinan dalam islam, hal ini berdasarkan firman allah dalam surah an-Nisa :59

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْۚ فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ
اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَأْوِيْلًا

"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya."

Berdasarkan ayat di atas dapat di pahami bahwa seorang pemimpin yang kurang menaati peraturan yang telah ditentukan maka dia kurang menjalankanamanah dalam mengemban tanggung jawab yang diberikan

kepadanya sesuai dengan *fiqh siyasah*. Sebagaimana hakikat kepemimpinan mennurut islam yaitu seorang pemimpin harus bisa melayani dan tidak meminta untuk dilayani. Maka Wali nagari Tanjung Betung Timur dituntut untuk bertanggung jawab terhadap tugasnya untuk melayani masyarakat sebab tanggung jawab tersebut tidak hanya akan dipertanggungjawabkan di dunia tetapi juga dipertanggungjawabkan di akhirat kelak.

Akan tetapi tanggung jawab disini bukan semata mata bermakna melaksanakan tugas setelah itu selesai dan tidak menyisakan dampak bagi yang dipimpin melainkan lebih dari pada itu, yang dimaksud tanggung jawab disini adalah lebih berarti upaya seorang pemimpin untuk kesejahteraan bagi pihak yang dipimpin.

Seorang pemimpin juga harus menjadi teladan dan pelopor bagi rakyatnya yang memiliki sikap terhadap nilai-nilai kebaikan dan kebenaran, pemimpin yang baik dapat menjadi panutan bagi bawahannya atau rakyat yang dipimpinnya sebgaimana kepemimpinan rasulullah, kepribadiannya sebagai pemimpin, di dalam pola berfikir, bersikap dan berperilaku merupakan pancaran isi kandungan al qur an sehingga sepatutnya di teladani.

Dalam Islam Wali nagari lebih cenderung dipersfektifkan untuk bagaimana cara atau kinerja pemimpin itu harus sesuai dengan ruang lingkup *fiqh siyasah* yang terdiri dari beberapa prinsip yaitu:

1. Prinsip kedaulatan

Wali nagari merupakan pemimpin dalam suatu instansi pemerintahan sebagaimana kepemimpinan dalam islam dalam tinjauan *fiqh siyasah* diperintahkan untuk menaati pemimpin oleh sebab itu allah memerintahkan untuk menaati pemimpin diantara kamu, kewajiban rakyat adalah taat kepada pemimpin selama tidak bermaksiat kepada allah. Wali nagari adalah pemimpin yang mrupakanpenguasa tertinggi dalam suatu nagari, kekuasaan itu harus lah betul-betul di manfaatkan untuk mencapai kebaikan bersama, jika kekuasaan itu diselewengkan atau disia-siakan akan timbullah berbagai kerusakan.

Dengan demikian menurut observasi yang penulis temukan di lapangan seorang pemimpin di dalam hal ini Wali nagari Tanjung Betung Timur kurang paham terkait peraturan perundang-undangan, tugas dan tanggung jawab yang berkaitan dengan Wali nagari, ia kurang menjalankan amanah dalam mengemban tanggung jawab yang diberikan masyarakat kepadanya sesuai dengan konsep kepemimpinan menurut *fiqh siyasah* dan prinsip umum kepemerintahan sebagaimana hakikat kepemimpinan menurut islam yaitu seorang pemimpin harus melayani dan tidak meminta untuk dilayani.

2. Prinsip keadilan

Ada empat hal dasar yang dapat diteladani dari sifat Rasulullah yaitu, sifat *siddiq* yang berarti jujur dalam perkataan dan perbuatan, Sifat *amanah* yang berarti dapat dipercaya dalam menjaga tanggung jawab, *tabligh* yang berarti menyampaikan segala macam kebaikan kepada masyarakatnya dan *fathanah* yang artinya cerdas dalam mengelola masyarakat. Dengan demikian Wali nagari dalam melaksanakan pembangunan dan pemberdayaan terhadap masyarakat nya yang

multikultural yang terdiri dari berbagai macam suku dan budaya yang ada, Wali nagari kurang bertanggung jawab dan kurang adil dalam melaksanakan perannya sebagai pemimpin pemeritahan nagari hal ini dapat dilihat dari kurang optimalnya peran Wali nagari dalam menjalankan tugas, hak dan wewenang serta kewajibannya sebagai Wali nagari karena seorang pemimpin tidak hanya mengerti terhadap tugas dan tanggung jawabnya saja namun lebih dari itu, sebagai seorang pemimpin dituntut untuk memiliki adab dan memberikan contoh kehidupan seorang pemimpin yang layak dan patut untuk masyarkatnya akan tetapi ini sangat bertolak belakang dengan kinerja yang dilakukan oleh Wali nagari dalam melaksanakan pemberdayaan terhadap masyarakatnya yang multikultural, hal ini ditandai dengan tidaak adanya keadilan kepda masyarakat terhadap pembangunan atau pembantuan yang diberikan oleh Wali nagari kepada masyarakatnya.

Penulis menanyakan kepada bapak Sartoni sebagai ketua BAMUS nagari Tanjung Betung Timur beliau mengatakan bahwa: Dalam pembangunan dan pemberdayaan yang dilakukan oleh Wali nagari belum menyentuh keinginan masyarakat karena Wali nagari memberikan bantuan berupa pembangunan tidak sesuai dengan hasil musyawarah sebelumnya.[15]

Dengan demikian menurut wawancara di atas penulis melakukan observasi terkait kenerja Wali Nagari dalam melaksanakan pembangunan dan perberdayaan masyarakat yang multikultural di Nagari Tanjung Betung Timur belum mnyentuh keinginan masyarakat terkait keadilan menyangkut hak-hak masyarakat karena

[15] Sartoni, *wawancara pribadi*, Rambahan: 20 november 2023

masyarakat tidak menerima pembangunan apa yang di prioritaskan oleh masyarakat melalui musyawarah nagari.

3. Prinsip Musyawarah

Sebagaimana firman allah surat Ali-Imran 159

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللهِ لِنْتَ لَهُمْ ۚ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوْا مِنْ حَوْلِكَ ۖ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِى الْاَمْرِ ۚ فَاِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ ۗ اِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِيْنَ

"Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya"

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa dalam pengambilan keputusan harus melibatkan masyarakat bagaimana wawancara penulis dengan tokoh masyarakat Reski Rajo Nando beliau mengatakan bahwa: keterlibatan masyarakat daam mengambil keputusan sangat penting agar pemerintah mengetahui apa yang di inginkan masyarakat agar wali nagari tahu mana yang di inginkan msayarakat dan mana yang tidak diinginkan masyarakat. Karena kepentingan bersama lebih baik dari pada kepentingan pribadi pemimpin dalam hal ini (Wali nagari). Melaksanakan pembangunan sangat penting karena keberhasilan pelaksanaan pembangunan sangat bergantung peran pemerintah dan masyarakatnya.[16]

Dengan demikian menurut penulis pengambilan keputusan yang di ambil oleh Wali nagari masih kurang menerapkan prinsip musyawarah dan kurangnya

[16] Reski Rajo Nando, *wawancara pribadi*, Rambahan: 21 November 2022

mengkordinasikan pembangun nagari secara partisipatif yang didasari oleh kewenangan Wali nagari dalam menjalankan tuganya.

Kurangnya asas transparansi dan keterbukaan yang di maksudkan agar masyarakat mengetahui informasi dan kebijakan dan praktek penyelenggaraan pemerintah yang dijalankan sehingga wali nagari belum bisa menjungjung asas tersebut, dari segi keterbukaan dan akuntablitas yang belum baik merupakan cerminan ketidakprofesionalan. Hal ini di tandai kurangnya pemasanagan informasi seputar penggunaan dana Nagari baik berupa baliho maupun papa informasi lainnya sehingga penulis menyimpulkan wali nagari masing kurang melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan dalam musyawarah.

4. Prinsip Amar ma'ruf nahi munkar

Sebagaimana firman Allah Ali-Imran 104:

وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ اُمَّةٌ يَّدْعُوْنَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۗوَاُولٰۤىِٕكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ

"Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntunng"

Sikap oposisi, kritik membangun dan saran kepada pemerintah dibernarakan selama tidak memprovokasi kesatuan umat dan bangsa, dengan demikian seorang pemimpin menjalankan kepemimpiannya harus menyeru manusia kepada *amar ma'ruf nahi munkar* yaitu menyeru berbuat baik dan melarang manusia berbuat keburukan, jika Wali nagari memiliki prinsip *amar ma'ruf nahi munkar* maka kita diperintahkan wajib mengikuti pemimpin itu.

Masyarakat harus bisa memberikan masukan atau saran dan menegur Wali nagari yang bersikap otoriter dalam melaksanakan amanah yang diembannya tidak menjalankan tugas nya sesuai dengan peraturan udang-undang. Maka akan membawa perubahan besar untuk kemajuan nagari sehingga kesejahteraan masyarakat meningkat. Dengan demikian menurut penulis kinerja Wali nagari dalam memberdayakan masyarakat khususnya dalam pembangunan masyarakat yang dikaitkan dengan nila-nilai yang terkandung dalam konsep kepemimpinan menurut *fiqh siyasah* dan prinsip umum terkait pemerintahan belum sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan prinsip musywarah dalam *fiqh siayasah.* Jika dilihat dari pandangan *fiqh siyasah* terkait kepemimpinan Wali nagari dalam memberdayakan masyarakat multikultural dapat disimpulkan bahwa Wali nagari khusunya dalam pembangunan sudah optimal walaupun ada beberapa hal yang belum terealisasi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kepemimpinan wali nagari dalam pelaksanaan pembangunan di dalam masyarakat multikultural di nagari Tanjung Betung Timur belum mampu menjalankan kepemimpinannya dalam menjalankan pembangunan di dalam masyarakat yang multikultutal, hal ini di tandai dengan pembangunan yang lebih baanyak dilakukan terhadap masyarakat Minang saja sedangkan masyarakat suku lainnya belum tersentuh hasil pembanguan itu dan tidak sesuai dengan yang diharapkan dan diusulkan warganya, Wali nagari belum mampu dalam mengkoordinir penyelenggaraan pembangunan nagari serta belum bisa mengambil keputusan dengan memberikan alternatif terbaik bagi masyarakat dan kelompok yang ada di nagari.

2. Pandangan *Fiqh siyasah* terhadap kepemimpinan wali nagari pada masyarakat multikultural di Nagari Tanjung Betung Timur belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip yang terdapat dalam *fiqh siyasah* karena pengambilan keputusan yang dilakukan oleh wali nagari masih kurang menerapkan prinsip musyawarah dan belum mengefektifkan prinsip transparansi seperti sosialisasi dana nagari melalui pemasangan baliho atau sarana lainnya sehingga berpengaruh pada tingkat parstisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pemberdayaan.

B. Saran

1. Kepada wali nagari diharapkan mampu menjalankan kepemimpinannya dalam menjalankan pembangunan di dalam masyarakat yang multikultutal, meratakan pembangunan bukan hanya tertumpu pada satu titik atau lokasi saja, apakah sukunnya minang ataupun yang lainnya harus merata dalam bidang pembangunan, wali nagari diharapkan harus mampu dalam mengkoordinir penyelenggaraan pembangunan nagari serta bisa mengambil keputusan dengan memberikan alternatif terbaik bagi masyarakat dan kelompok yang ada di nagari.

2. Kepada wali nagari diharapkan untuk menjunjung tinggi prinsip keadilan dan musyawarah serta prinsip transparansi kepada masyarakat agar tercapai pemimpin yang amanah yang mengetahui kebutuhan dari masyarakatnya tanpa membedakan masyarakat satu dengan masyarakat lainnya
3. Kepada masyarakat diharapkan agar bisa memberikan masukan atau saran dan menegur jika wali nagari dalam melaksanakan amanah yang diembannya tidak menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, “Multikulturalisme”,Kompas,16 Mei 2022

AH. Sanaky Hujair , *Dinamika perkembangan Pendidikan Islam di Indonesia*,(Yogyakarta: Kaukaba, 2016)

Ahmad Saebani Beni, *Pengantar Antropologi*,(Bandung: CV Pustaka Setia, 2012)

Al- Faruq Fajar, *wawancara pribadi*, Rambahan: 21 november 2023

Al Syaifullah Shalahuddin, Putri Anggun Bhakti Insanitaqwa, Mufidah Sofyan, “Kepemimpinan Pendidikan Islam”, *Jurnal ilmiah Indonesia*, 1, no. 7 (Juli 2021)

Al-Djufri, Moh. Salim. *Kepemimpinan* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014)

Al-Mawardi Abu Al-Hasan, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Islam*, terj. Abdul Hayyie, Kamaluddin Nurdin (Jakarta : Gema Insani, 2000)

Al-Mawardi, *Al-Ahkam Al-Sulthaniyah* (Bairut: Dar Al-Fikr, 1980)

Andi Hepi Bastoni, *Sejarah Para Khalifah*, (Bogor: Pustaka Al-kautsar, 2009)

Anoraga Panji, *Manajemen Bisinis,* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004),

Anwar Chairul, *Hukum Adat Indonesia Meninjau Adat Minangkabau*,(Jakarta: PT. Rhineka Cipta,1997)

Arsip Nagari Tanjung Betung Timur 2022

Azhar Purjatian, “Kesetaraan dalam Masyarakat Multikultural”, *Jurnal Asketik: Agama dan perubahan sosial*, 4, No. 2 (Desember 2020), 3

Baharudin dan Uniarso, *Kepemimpinan Pendidikan Islam Antara Teori dan Praktik* (Yogyakarta: AR-RUZZ MEDIA, 2012)

Budiman Hikmat, *Hak Minoritas: Dilema Multikulturalisme di Indonesia* (Jakarta: Yayasan Interseksi, 2007)

Departemen *Pendidikan dan kebudayaan*, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta : Balai Pustaka, 1990)

Dewi Ernita, *Menggagas Kriteria Pemimpin Ideal*,cet ke-1 (Yogyakarya: AK Group, 2006),

Marbawi Idris, *Kamus Idris Al-Marbawy*, juz 1, (Mesir: Mustafa Al-Halaby wa Auladuhu, 1359 H)

Ferryanto Hanif, Implementasi Kepemimpinan Islam dalam Proses Inovasi Produk, Jurnal Ekonomi Syariah, Vol. 2, No. 3 (Maret 2015)

Gunawan, *Wawancara pribadi,* Rambahan: 21 November 2023

H.A.R Tilar, *Multikulturalisme Tantangan-Tantangan Global Masa Depan Dalam Transformasi Pendidikan Nasional* (Jakarta: PT Grasindo, 2004)

Hadar Ivan, " Msyarakat Multikulturalisme", Kompas, 26 September 2023

Hamdani, *Wawancara pribadi,* Rambahan Selatan: 20 November 2023

Ibnu Khaldun Abdul Rahman, *Muqaddimat* (t.t.t: Maktabah Al-Tijariyah Al-Kubs, t.t)

Istijanto, *Riset Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2006)

Iwan, *Wawancara pribadi,* Rambahan: 21 November 2023

Jawwad Abdul Muhammdah, *Trik Cerdas Memimpin Cara Rasulullah* ,terj. Abdurrahman Jufri, (Solo: Pustaka Iltizam, 2009)

Kartono Kartini, *Pemimpin dan Kepemimpinan* (Jakarta: Rajawali, 1983)

Katsir Ibnu , *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir, (terj), M. Nasib Ar-Rifa'i*, (Jakarta: Gema Insani, 1999)

Kolip Setiadi , *Pengantar sosiologi pemahaman dan Gejala Permasalahan Sosial* (Bandung : Kencana, 2011)

M. Setiandi Elly, Usman Kholid, *Pengantar Sosiologi* (Jakarta: Kencana, 2011)

Mahdud Choirul, *Pendidikan Multikultural* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009)

Mujianto, *wawancara pribadi*, Rambahan: 21 november 2023

Mujieb Abdul, *Kamus Istilah Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994),

Najmatuz Zahro, "Pengaruh Gaya Kepemimpinan terhadap semangat Kerja Karyawan Pada KUD", (Malang: UIN Malang (Skripsi), 2005)

Nasaruddin, *wawancara pribadi*, Rambahan: 20 november 2023

Nawawi Hadari, *Administrasi Pendidikan* (Jakarta: Haji Mas Agung, 1987)

Nur Hayati Ifa "Masyarakat Multikultural (pengertian, ciri, dan faktor pembentuknya", *Akademika* 14, no. 1 (Juni, 2021)

P.Siagian Sondang,*Tipe-Tipe Kepemimpinan* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009)

Pasolong Harbani, *Kepemimpinan Birokrasi* (Bandung: Alfabeta, 2013)

Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman, No. 1, Tahun, 2017

Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman, No. 7, Tahun 2017

Prima Afdhal , "Sistem Pemerintahan Nagari (Studi Pada Nagari Padang Magek Kabupaten Tanah Datar", *Jurnal FISIP* 1, no. 2 (2014)

Putri Raihan, *Kepemimpinan Perempuan Dalam Islam*,cet ke-1(Yogyakarta: AK Group, 2006)

Putry Raihan, "Kepemimpinan Perempuan Dalam Persfektif Islam", *Jurnal Mudarissuna*, 4, no. 2 (Desember 2015)

Quthb Sayyid,*Tafsir fi Zhilalil Qur'an, (terj), As'ad Yasin*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002)

Rajo Nando Reski, *wawancara pribadi*, Rambahan: 21 November 2022

Ramlan, *wawancara pribadi*, Rambahan: 20 november 2023

Rivai, Veitzhal dan Mulyadi Deddy. *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2003)

Rohmaniah Siti," Peran Agama Dalam Masyarakat Multikultural," "Jurnal Ri'Ayah.3, no. 1 (Maret 2018)

Saddam dan Ilmiawan Mubin, "Perbandingan Sistem Sosial Budaya Indonesia dari Masyarakat Majemuk ke Masyarakat Multikultural", *Jurnal Kajian,Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Sejarah*, 5, no. 2

Sagala Saiful, *Pendekatan dan Model Kepemimpinan cetakan ke-1* (Jakarta : Kencana, 2018)

Sakmar, *Wawancara pribadi*, Rambahan: 21 November 2023

Sartoni, *wawancara pribadi*, Rambahan: 20 november 2023

Shabir Mukclis, *Terjemah Riyadhus Shalihin*, jilid 1, (Semarang: Karya Toha Putra, 2004)

Shihab M.Quraish, *Tafsir al-Mishbah Pesan, Kesan, dan keserasian al-Qur'an*, Cet ke-1 (Ciputat: Lentera Hati, 2000)

Simamora Abdul, *Wawancara pribadi*, Rambahan Selatan: 20 November 2023

Soehardjono, *Kepemimpinan: Suatu Tinjauan singkat tentang Pemimpin dan Kepemimpinan serta Usaha-usaha Pengembangannya* (Malang: APDN Malang Jawa Timur,1998),

Soekanto Soerjono, *Sosiologi suatu pengantar* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012)

Suparlan Parsudi, "Menuju Masyarakat Indonesia yang Multikultural",*Jurnal Antropologi Indonesia*, no. 69 (2002)

Supriyoko, *Pendidikan Multikultural dan Revitalisasi Hukum adat dalam perspektif Sejarah* (Bandung : Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, 2005)

Sutisno Edi, *Manajemen Sumber Daya Manusi* (Jakarta: Kencana Prenanda Media Group,2009)

Tamyis Ahmad, *Konsep Pemimpin dalam Islam*,(Lampung ; UIN Lampung(skripsi), 2018)

W.J.S Purwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1976)

Kartasapoetra dan Hartini, *Kamus Sosiologi dan Kependudukan* (Jakarta: Bumi Aksara, 1992)

Wahjosumidjo, *Kepemimpinan dan Motivasi* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994)

Yasmin, *Wawancara pribadi,* Rambahan: 20 November 2023

Yuki Gary , *Kepemimpinan dalam Organisasi*, Edisi 5, terj. Budi Supriyanto (Jakarta:PT. Indeks, 2009)

Zubaedi, *Pendidikan berbasis masyaraka* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2006)

Zulkandri, *Wawancara pribadi,* Rambahan: 21 November 2023

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Identitas Diri

Nama	:Miftahul Fathon
NIM	:1318.009
TTL	:Rambahan, 27 Desember 1999
Alamat	:Rambahan, Jorong Rambahan, Nagari TanjungBetung Timur, Kecamatan Rao Selatan, Kabupaten Pasaman
Anak dari	: Nasrul (Ayah) dan Elmi (Ibu)
Jumlah bersaudara	: Ke-1 (satu) dari 3 bersaudara

Pendidikan

1. Sekolah Dasar (SD) Negeri 04 Rambahan Tamat tahun 2012
2. Madrasah Tsanawiyah (MTS) Negeri Langsat Kadap Rao Tamat tahun 2015
3. Madrasah Aliyah (MA) Negeri 1 Pasaman Tamat tahun 2018
4. Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech Djamil Djambek Bukittinggi Tamat tahun 2024